



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUKURAN TATA KELOLA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan penguatan tata kelola di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan penguatan tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan instrumen guna mengukur kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengukuran Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKURAN TATA KELOLA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
7. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker dan atau Satfung adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
9. Tata Kelola Polri adalah serangkaian proses pengelolaan dan penataan penguatan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas dan pengawasan melalui interaksi antar satuan fungsi di lingkungan Polri dan masyarakat.
10. Indeks Tata Kelola Polri yang selanjutnya disingkat ITK Polri adalah instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri.
11. Asesmen organisasi adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan organisasi untuk mencapai kesempurnaan fungsi dan struktur Satker dan/atau Satfung Mabes Polri demi mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dan disetarakan dengan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Pasal 2

Pengukuran Tata Kelola Polri, bertujuan untuk:

- a. menilai kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri;
- b. mengetahui profil dan kinerja Satker dan/atau Satfung di lingkungan Polri; dan
- c. perbaikan organisasi Polri di bidang pembinaan dan operasional.

Pasal 3

Pengukuran Tata Kelola Polri dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. independen, yaitu pengukuran dilaksanakan secara mandiri untuk menjaga netralitas, objektivitas dan kesahihan data;
- b. kompeten, yaitu pengukuran dilaksanakan oleh tim yang berpengalaman di bidang tata kelola khususnya dalam pembuatan ITK Polri dan Asesmen organisasi;
- c. transparan, yaitu pengukuran dilaksanakan secara terbuka;
- d. akuntabel, yaitu pengukuran dilakukan dengan penuh tanggung jawab didukung oleh bukti dukung yang dapat diverifikasi kebenarannya; dan
- e. integritas, yaitu memiliki nilai kejujuran, peduli, berani, bekerja keras, adil dan disiplin.

BAB II

CARA PENGUKURAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Jenis Pengukuran

Pasal 4

Pengukuran Tata Kelola Polri dilaksanakan melalui:

- a. Asesmen organisasi; atau
- b. ITK Polri.

Pasal 5

- (1) Asesmen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada Satker dan/atau Satfung di lingkungan Markas Besar Polri.
- (2) Asesmen organisasi menggunakan metode:
 - a. studi literatur;
 - b. kuantitatif dengan analisis dan observasi data objektif; dan
 - c. kualitatif dengan analisis data persepsi.

- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 6

- (1) ITK Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada Satker dan/atau Satfung di lingkungan Polda dan Polres.
- (2) ITK Polri menggunakan metode:
 - a. studi komparasi;
 - b. kuantitatif dengan analisis dan observasi data objektif;
 - c. kualitatif dengan analisis data persepsi;
 - d. observasi layanan publik; dan
 - e. pembobotan tingkat indikator dan prinsip.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua

Standar Pengukuran

Pasal 7

- (1) Standar Pengukuran Tata Kelola Polri, terdiri atas:
 - a. kompetensi, merupakan kapasitas dan kemampuan Satker dan/atau Satfung untuk dapat menjalankan tugas, meliputi aspek:
 1. sumber daya manusia;
 2. sarana prasarana; dan
 3. piranti lunak;
 - b. responsif merupakan daya tanggap Satker dan atau Satfung dalam menjalankan tugasnya meliputi aspek:
 1. inisiatif;
 2. kreatif;
 3. inovatif; dan
 4. kecepatan pelayanan;

- c. perilaku, merupakan sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran Satker dan/atau Satfung dalam menjalankan tugasnya berdasarkan data yang bersumber dari fungsi pengawas internal dan eksternal yang meliputi aspek:
 - 1. pelanggaran disiplin dan kode etik; dan
 - 2. tindak pidana;
 - d. transparansi, merupakan keterbukaan informasi Satker dan/atau Satfung yang mudah diakses oleh publik sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek:
 - 1. pelayanan publik; dan
 - 2. pengelolaan anggaran;
 - e. keadilan, merupakan implementasi tugas oleh Satker dan/atau Satfung secara setara, seimbang dan tidak memihak, meliputi aspek:
 - 1. pelayanan publik;
 - 2. sumber daya manusia;
 - 3. anggaran; dan
 - 4. sarana dan prasarana;
 - f. efektivitas, merupakan ketercapaian target dan tujuan sesuai dengan perencanaan Satker dan/atau Satfung, meliputi aspek:
 - 1. program;
 - 2. kegiatan; dan
 - 3. hasil;
 - g. akuntabilitas, merupakan pertanggungjawaban proses pelaksanaan tugas Satker dan/atau Satfung, meliputi aspek:
 - 1. kinerja; dan
 - 2. anggaran.
- (2) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Ketiga
Hasil Pengukuran

Pasal 8

Hasil pengukuran Tata Kelola Polri dengan rentang nilai:

- a. 1,00 sampai dengan 2,29, sangat buruk;
- b. 2,30 sampai dengan 3,57, buruk;
- c. 3,58 sampai dengan 4,86, cenderung buruk;
- d. 4,87 sampai dengan 6,14, sedang;
- e. 6,15 sampai dengan 7,43, cenderung baik;
- f. 7,44 sampai dengan 8,71, baik; dan
- g. 8,72 sampai dengan 10,00, sangat baik;

Pasal 9

- (1) Hasil pengukuran yang diperoleh Satker dan/atau Satfung dilengkapi dengan rekomendasi oleh tim penilai.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan kinerja;
 - b. usulan peningkatan:
 1. tunjangan kinerja;
 2. dukungan operasional; dan
 3. dukungan sarana prasarana; dan/atau
 - c. usulan pembinaan karier.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk Satker dan/atau Satfung yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan langsung untuk pengukuran Tata Kelola Polri melalui asesmen organisasi bagi Satker dan/atau Satfung yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf g.

- (5) Pengukuran Tata Kelola Polri melalui ITK Polri yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf g:
 - a. diusulkan penilaian zona integritas untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani; dan
 - b. setelah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani dapat diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 10

- (1) Tim penilai pengukuran Tata Kelola Polri terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat melibatkan pihak eksternal sesuai kompetensi dan berpengalaman di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pembuatan indeks tata kelola pemerintahan, ITK Polri dan asesmen organisasi.
- (3) Tim penilai pengukuran Tata Kelola Polri dibentuk berdasarkan:
 - a. surat perintah Kapolri bagi anggota Polri; dan
 - b. surat tugas Kapolri bagi pihak eksternal.

BAB III

MEKANISME PENGUKURAN TATA KELOLA

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengukuran Tata Kelola Polri meliputi tahap:
 - a. persiapan;

- b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembentukan tim penilai;
 - b. pembentukan kerangka, metodologi, standar dan indikator pengukuran; dan
 - c. penetapan Satker dan/atau Satfung yang akan dinilai.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengumpulan data;
 - b. pemrosesan data;
 - c. pembobotan;
 - d. pembentukan indeks dilaksanakan secara manual atau berbasis teknologi; dan
 - e. penyusunan laporan rekomendasi.
- (4) Tahap pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. monitoring; dan/atau
 - b. analisis dan evaluasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf:

1. Pemrakarsa/

Karo RBP Srena Polri:

2. Asrena Kapolri:

3. Kadivkum Polri :

4. Kasetum Polri :

5. Wakapolri :

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUKURAN TATA KELOLA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. METODE ASESMEN ORGANISASI

a. Studi Literatur

Studi literatur di beberapa negara menemukan acuan pengukuran yang dapat diterapkan untuk mengukur tata kelola Polri. Mastrofski (1999) menyebut ada enam standar tata kelola yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja polisi, yaitu:

- 1) *Attentiveness* : tingkat kehadiran Polisi di tengah masyarakat;
- 2) *Reliability* : tingkat kecepatan/cepat tanggap;
- 3) *Responsiveness* : upaya untuk memenuhi permintaan masyarakat dan memberikan penjelasan terhadap alasan tindakan dan keputusan;
- 4) *Manner* : memperlakukan masyarakat dengan penuh penghargaan;
- 5) *Competence* : kompetensi/kecakapan anggota Polri;
- 6) *Fairness* : perlakuan yang adil terhadap semua tanpa terkecuali.

Selain studi literatur, penyusunan ITK juga didasarkan hasil pemetaan terhadap hasil studi yang pernah dilakukan terhadap Polri oleh beberapa lembaga, diantaranya; Menteri PANRB, KPK, BPK, UNODC dan Kemitraan. Berdasarkan hasil temuan beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa salah satu isu krusial dalam pengukuran tata kelola Polri adalah untuk melihat sejauh mana capaian program Reformasi Birokrasi yang memiliki tujuan terhadap pembenahan tiga bidang sasaran, yakni: struktural, instrumental dan kultural dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

- 1) Selain menggunakan literatur tata kelola kepolisian secara umum, Asesmen organisasi Polri, khususnya Satker yang di bawah jajaran Lemdiklat Polri juga menggunakan prinsip tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yaitu:
 - a) penjaminan mutu–relevansi;
 - b) keadilan;
 - c) efektivitas–efisiensi;
 - d) independensi;
 - e) transparansi; dan
 - f) akuntabilitas.

- 2) Definisi Prinsip Good University Governance:
 - a) Penjaminan Mutu–Relevansi, adanya Sistem Penjaminan Mutu internal (SPM) maupun eksternal (akreditasi program studi), menerapkan pembelajaran modern yang relevan terhadap kebutuhan nasional, global dan perkembangan IPTEKS. Untuk itu diperlukan adanya sertifikasi profesi dosen (pengajar), *feedback* dari mahasiswa, *tracer study* (lulusan/alumni), serta survei pengguna.
 - b) Keadilan, proses pengangkatan pegawai dan pejabat harus didasarkan pada kompetensi dan *track record*, penerapan *merit system* (insentif dan disinsentif) yang tepat dalam pengelolaan pegawai.
 - c) Efektivitas–Efisiensi, lembaga pendidikan mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur dengan kualitas yang terstandar, berdasarkan perencanaan jangka panjang (masterplan akademik dan fisik), menengah dan pendek (tahunan) yang mencakup perencanaan, programing dan *budgeting* yang efisien untuk mencapai *output* dan *outcome* yang ingin dicapai.
 - d) Transparan, adanya mekanisme *checks and balances* dan upaya menghindari *conflict of interest* dan jabatan rangkap, dengan adanya pengawas yang mengontrol para pejabat/pengelola.

- e) Akuntabilitas, pengelolaan lembaga pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada *stakeholder* internal (mahasiswa, pengajar, karyawan), maupun kepada pihak eksternal (pemerintah, BNSP, badan hukum penyelenggaranya, maupun masyarakat secara luas. Untuk itu misi dan tujuan, sejalan dengan mandat pemerintah (masyarakat) dan pengelola serta tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan dalam Renstra & RKA.
- f) Responsibilitas–Bertanggung jawab, taat pada komitmen institusi untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana yang sudah diamanatkan. Untuk itu perlu adanya statuta–penjabaran kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab dan kewenangan setiap unsur organisasi; *job description* personel dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas.

b. Kuantitatif dengan Analisis Data Observasi dan Data Objektif

Asesmen Organisasi Polri tersusun dari gabungan indikator yang terdiri dari indikator yang bersumber pada data objektif dan observasi terkait dengan Tupoksi masing-masing Satker. Setiap indikator ini memiliki karakteristik khusus berdasarkan jenis data dan teknik pengumpulan data.

CONTOH FORMULIR PENGISIAN GABUNGAN DATA OBJEKTIF DAN OBSERVASI ITWASUM POLRI

I. INFORMASI PENELITI					
	Uraian	Peneliti			Pemeriksa
1.	Nama				
2.	Tanggal				
II. KETERANGAN SATKER					
1.	SATKER	ITWASUM POLRI			
2.	Nama Irwasum Polri		tanda tangan :		
3.	Nama Karorenmin		tanda tangan :		
4.	Nomor Telp/HP Karorenmin				
5.	Nama Staf Kabagrendafung		tanda tangan :		
6.	No Telpon/HP Kabagrendafung				

III. DAFTAR DATA OBJEKTIF			
No	Indikator	Verifikasi (diisi oleh peneliti)	Bukti Dukung (Tahun 2016)
1.	Jumlah personel riil dibanding jumlah DSP	Jumlah Personel Riil Personel Jumlah DSP Personel	1. Daftar personel riil beserta jenis kelamin 2. Daftar Susunan Personel (DSP)
2.	Jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang pengawasan Umum dibandingkan jumlah personel riil <i>Keterangan: Jika 1 anggota sudah memiliki sertifikat Dikbangspes, maka tidak perlu dilampirkan Prolat ataupun ijazah</i>	Jumlah personel yang telah mengikuti Diklat terkait dengan Audit Personel Jumlah personel yang telah mengikuti Diklat dasar Personel Jumlah personel yang telah mengikuti Diklat audit barang dan jasa Personel Jumlah personel yang telah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli (JFA) Personel Jumlah personel yang telah mengikuti Diklat Reviu (laporan keuangan, RKKL) Personel Jumlah personel yang telah mengikuti Diklat Audit Investigasi Personel Jumlah personel yang telah mengikuti Sespim Personel Jumlah personel yang telah mengikuti Lemhanas Personel Jumlah Personel yang berijazah S1 Personel Jumlah Personel yang berijazah S2 Personel Jumlah Personel yang berijazah S3 Personel	1. Daftar nama dan jenis Dikbangspes dan pelatihan yang pernah diikuti 2. Kopi/foto sertifikat personel (Dikbangspes, sertifikasi, pendidikan formal dan pelatihan terkait)
3.	Jumlah personel Itwasum yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah personel yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP orang	1. Daftar personel Itwasum yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari LKPP 2. Bukti fotokopi sertifikat dari LKPP
4.	Jumlah personel (pejabat) yang memiliki kompetensi bidang manajerial terhadap jabatan struktural (sampai dengan level Kasubbag)	Jumlah personel yang berijazah Sespimti/Diklatpim tingkat I/Lemhanas Personel Sespimen/Diklatpim tingkat II Personel PTIK/Sespimma/Diklatpim tingkat III Personel	1. Daftar Nama Kepala Biro dan Kabag IIB1 2. Daftar Nama Kabag IIB3 dan Kasubbag 3. Daftar Nama Kasubbag 4. Fotokopi ijazah/sertifikat masing-masing Dikbang yang diikuti
5.	Hasil penilaian Dalmutu terhadap Auditor	Nilai rata-rata mutu auditor Pernyataan hasil wasrik wasrik	1. Tabulasi Hasil Wasrik 2. Pernyataan hasil Wasrik perbidang, yang menilai Bagdalmutu

6.	Rekapitulasi hasil audit investigasi	Jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2017	Kasus / Pengaduan	Rekapitulasi pengaduan yang masuk dan yang ditindaklanjuti Dalmutu
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti di tahun 2017	Kasus / Pengaduan	
7.	Rekapitulasi Hasil Reviu	Jumlah Hasil Reviu tahun 2017	buah	dokumen PKPT
8.	Jumlah personel (pejabat) yang memiliki kompetensi bidang manajerial terhadap jabatan struktural (sampai dengan level Kasubbag)	Jumlah personel yang berijazah Sespimti/Diklatpim tingkat I/Lemhanas	Personel	Kepala Biro dan Kabag IIB1
		Sespimen/Diklatpim tingkat II	Personel	Kabag IIB3 dan Kasubbag
		PTIK/Sespimma/Diklatpim tingkat III	Personel	Kasubbag
9.	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) Satker	1. Pilun terkait Audit	buah	1. Daftar Piranti Lunak (Pilun) yang bersumber dari Perkap 2. <i>Soft copy</i> dokumen Pilun yang dimiliki terkait Tupoksi Itwasum
		2. Pilun terkait Evaluasi	buah	
		3. Pilun terkait Reviu	buah	
		4. Pilun terkait Pengawasan lain	buah	
		5. Pilun terkait Pemantauan dan melaporkan hasil temuan Wasrik	buah	
10.	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Satker Itwasum	1. SOP petunjuk pelaksanaan Tupoksi Itwasum	buah	1. Daftar SOP inisiatif SOPS yang dibuat oleh Irwasum; Karo; atau Kabag) 2. Kopi SOP inisiatif Itwasum
		2. SOP terkait Audit	buah	
		3. SOP terkait Evaluasi	buah	
		4. SOP terkait Reviu	buah	
		5. SOP terkait Pengawasan lain	buah	
		6. SOP terkait Pemantauan dan melaporkan hasil temuan Wasrik	buah	
11.	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/sekolah/swasta/Pemda dan lembaga lain)	Jumlah MoU	Kesepakatan	<i>Soft copy</i> MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/sekolah/swasta/pemda dan lembaga lain)
12.	Jumlah personel Itwasum yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap total jumlah personel			Dokumen sidang pelanggaran kode etik, disiplin dan pidana
	a. Jumlah pelanggaran kode etik	orang		
	b. Jumlah pelanggaran disiplin	orang		
	c. Jumlah pelanggaran pidana	orang		
13.	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	Laporan <i>Performance Evaluation</i> 2017	buah	Daftar laporan penilaian prestasi personel
14.	Rasio pejabat yang melaporkan LHKPN terhadap total pejabat struktural	Jumlah LHKPN	buah	1. Kopi LHKPN 2. Daftar LKHPN Pejabat Itwasum

15.	Rasio Auditor yang melaporkan LKHPN terhadap total Auditor	Jumlah LKHPN buah	1. Kopi LHKPN 2. Daftar LHKPN Auditor Itwasum
16.	Independensi pelaksanaan Audit	Jumlah piagam Audit buah	1. Daftar Piagam Audit yang dikeluarkan oleh Itwasum 2. Kopi Piagam Audit yang dikeluarkan oleh Itwasum
17.	Tingkat Keterbukaan Anggaran	0=Tidak dapat diakses 1=Diakses dengan prosedur tertentu 2=Terpampang di depan kantor tapi hanya salah satu angka penetapan/perubahan/realisasi 3=Terpampang di depan kantor penetapan dan realisasi (serapan) anggaran 4=Laporan diunggah di website/blog/media sosial, lengkap tapi bukan rutin tahunan 5=Dapat diakses melalui website, lengkap dan rutin tahunan	(mohon dipilih salah satu) 1. Bukti foto anggaran dan realisasi yang dipampang di papan informasi Satker 2. <i>Print screen/alamat website/medsos</i> yang memuat anggaran dan realisasi (jika ada) di laman Satker atau TI
18.	Jumlah DIPA anggaran beserta Realisasi/Serapan Tahun Anggaran 2017	Jumlah DIPA 2017 rupiah	1. Dokumen DIPA Anggaran, revisi dan RKKAL realisasi belanja barang (per tahun) 2. Lampirkan bukti dukung yang relevan.
		Realisasi Belanja 2017 (serapan) rupiah	
19.	Transparansi obyek yang akan diwasrik	0=Tidak ada disampaikan 1=Disampaikan pada saat pelaksanaan 2=Disampaikan 1 hari menjelang pelaksanaan 3=Disampaikan satu minggu sebelum pelaksanaan 4=Disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan	(mohon dipilih salah satu) 1. Dokumen Wasrik 2. PKPT 3. Surat Telegram (ST)
20.	Transparansi daftar Tim Wasrik	0=Tidak ada disampaikan 1=Disampaikan pada saat pelaksanaan 2=Disampaikan 1 hari menjelang pelaksanaan 3=Disampaikan satu minggu sebelum pelaksanaan 4=Disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan	(mohon dipilih salah satu) Dokumen daftar Tim Wasrik kepada Satker sebelum di Wasrik

21.	Kejelasan Prosedur Wasrik	0=Tidak dapat diakses 1=Diakses dengan prosedur tertentu 2=Terpampang di depan kantor 3=Sebagian diunggah di website/blog/media sosial 4=Diunggah di website/blog/media sosial, secara lengkap (mohon dipilih salah satu)	Dokumen Prosedur Wasrik
22.	Transparansi pemaparan temuan Wasrik kepada Satker pada saat taklimat akhir	0=tidak dipaparkan 1=dipaparkan sekilas setelah selesai wasrik 2=disampaikan secara tertulis 3=disampaikan secara tertulis dan dipaparkan secara lengkap setelah Wasrik (mohon dipilih salah satu)	1. Tabulasi temuan audit 2. Dokumen pemaparan temuan wasrik
23.	Jumlah Polwan yang menduduki jabatan struktural dari total seluruh pejabat di Satker ini (Kabag dan Kasubbag)	Jumlah Polwan menduduki jabatan struktural orang	1. Struktur organisasi 2. Daftar nama dan jenis kelamin pejabat struktural
		Jumlah total pejabat struktural orang	
24.	Opini hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Polri	Opini Audit BPK tahun 2017	Dokumen Audit BPK
25.	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker			
a.	Reformasi Birokrasi	0=Tidak dapat diakses 1=Diakses dengan Prosedur tertentu 2=Terpampang di depan kantor 3=Sebagian diunggah di website/blog/media sosial 4=Diunggah di website/blog/media sosial, secara lengkap (mohon dipilih salah satu)	Kopi dokumen Laporan RB
	Zona Integritas	 (mohon dipilih salah satu)	Kopi dokumen laporan ZI
	Quick wins	 (mohon dipilih salah satu)	Kopi dokumen laporan <i>Quick wins</i>
26.	Jumlah personel Itwasum yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah personel yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP orang	1. Daftar personel Itwasum yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari LKPP 2. Bukti fotokopi sertifikat dari LKPP

27.	<p>Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN.</p> <p><i>Mohon lingkari salah satu jawaban dan lampirkan bukti data yang membuktikan jawaban tersebut</i></p>	<p>0=Sistem sudah didapat dari pusat namun belum terinstal atau belum ada SDM yang mampu menjalankannya</p> <p>1=Sudah menggunakan sistem pusat tetapi pencatatan di lapangannya masih manual</p> <p>2=Ada sistem tetapi bergantung hanya pada 1 orang saja dan jika orang ini tidak masuk maka data tidak dapat diakses.</p> <p>3=Ada sistem tetapi hanya menunjukkan posisi akhir, tidak ada pencatatan kapan barang masuk dan keluar.</p> <p>4=Sistem pusat berjalan dan sistem di lapangan juga berjalan dengan rapi, rutin dan dapat diakses oleh siapapun namun belum ada pencatatan aset recovery.</p> <p>5=Sistem e-asset manajemen terupdate, real time, lengkap dan transparan</p>	<p>(mohon dipilih salah satu)</p> <p>Laporan SIMAK BMN</p>
28.	<p>Laporan Anev Tahun 2017</p>	<p>0=tidak ada laporan</p> <p>1=ada laporan namun tidak lengkap</p> <p>2=ada laporan lengkap namun tidak ada analisa trend</p> <p>3=ada laporan lengkap disertai analisa dan rekomendasinya</p>	<p>(mohon dipilih salah satu)</p> <p>Salinan/kopi laporan anev</p>
29.	<p>Laporan Anev Hasil Operasi Tahun 2017</p>	<p>0=tidak ada laporan</p> <p>1=ada laporan namun tidak lengkap</p> <p>2=ada laporan lengkap namun tidak ada analisa trend</p> <p>3=ada laporan lengkap disertai analisa dan rekomendasinya</p>	<p>(mohon dipilih salah satu)</p> <p>Salinan/kopi laporan anev</p>
30.	<p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</p>	<p>Nilai/Skor Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</p>	<p>Kopi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</p>

31.	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester	0=tidak ada laporan 1=ada laporan namun tidak lengkap 2=ada laporan lengkap namun tidak ada analisa trend 3=ada laporan lengkap disertai analisa dan rekomendasinya	(mohon dipilih salah satu)	Kopi Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester
32.	Hasil penilaian kapabilitas APIP Polri	Nilai/Skor kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Laporan APIP dari BPKB

c. Kualitatif dengan Analisis Data Persepsi

Selain bersumber dari data objektif dan observasi, asesmen organisasi Polri juga membangun indikator yang bersumber dari data persepsi internal maupun eksternal terhadap satuan kerja yang diukur.

Data Persepsi internal dan eksternal diperoleh dari narasumber terpilih yang kriterianya ditentukan oleh tim peneliti ITK dan Mabes Polri yang meliputi responden tingkat Mabes Polri dan Polda. Responden dipilih secara purposif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebagaimana tabel di bawah ini:

Kriteria Umum Responden Internal Mabes Polri

- 1) Responden sudah menduduki jabatan minimal selama 3 (tiga) bulan.
- 2) Responden adalah pejabat fungsi Renmin pada Satker yang ditunjuk dan Wadir pada Direktorat atau diwakili oleh pejabat satu level dibawahnya.
- 3) Pejabat Renmin yang ditunjuk adalah:
 - Karorenmin pada Itwasum, Baintelkam, Bareskrim, Baharkam dan Lemdiklat;
 - Kabagrenmin pada Srena, SSDM, Sops dan Slog.

No	DAFTAR UNDANGAN PEJABAT INTERNAL POLRI
1	KABAGRENDAFUNG ROENMIN ITWASUM POLRI;
2	KABAGANEV ROENMIN ITWASUM POLRI;
3	KABAGRENMIN SOPS POLRI;
4	KABAGJIANSIS ROJIANSTRA SOPS POLRI;
5	KABAGRENMIN SRENA POLRI;

6	KABAGJAKUM ROJAKSTRA SRENA POLRI;
7	KABAGRENMIN SSDM POLRI;
8	KABAGJIANSIS ROJIANSTRA SSDM POLRI;
9	KABAGRENMIN SLOG POLRI;
10	KABAGRENLOG ROJIANSTRA SLOG POLRI;
11	KABAGREN ROENMIN LEMDIKLAT POLRI;
12	KABAGJIANDIKLAT ROJIANBANG LEMDIKLAT POLRI;
13	KABAGRENMIN AKPOL LEMDIKLAT POLRI;
14	KABAG BINDIK AKPOL LEMDIKLAT POLRI;
15	WAKETBID MINWA STIK LEMDIKLAT POLRI;
16	KABAGREN STIK LEMDIKLAT POLRI;
17	KABAGBINDIK SESPIMMEN SESPIM LEMDIKLAT POLRI;
18	KABAGJIANBANG SESPIM LEMDIKLAT POLRI;
19	KABIDDIKLAT DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI;
20	KASUBAG RENMIN DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI;
21	KABAGDIKLAT PUSDIKLANTAS LEMDIKLAT POLRI;
22	KASUBAGRENMIN PUSDIKLANTAS LEMDIKLAT POLRI;
23	KABAGDIKLAT PUSDIKBINMAS LEMDIKLAT POLRI;
24	KASUBAGRENMIN PUSDIKBINMAS LEMDIKLAT POLRI;
25	KASUBDIT I DITIPIDUM BARESKRIM POLRI;
26	KASUBDIT V DITNARKOBA BARESKRIM POLRI;
27	WADIR DITTIPIDSIBER BARESKRIM POLRI;
28	WADIR DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
29	KASUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI;
30	KASUBDITHARTIBUM DITSAMAPTA KORSABHARA BAHARKAM POLRI;
31	KASUBDITBHABINKAMTIBMAS DITBINMAS KORBINMAS BAHARKAM POLRI;
32	KABAGPROD ROANALIS BAINTELKAM POLRI;
33	KABAGOPSNAL KORLANTAS POLRI;
34	KABAGREN KORBRIMOB POLRI;
35	KABAGPENSAT ROPENMAS DIVHUMAS POLRI;
36	KABAGJIANSISKOM ROTTEKKOM DIVTIK POLRI;
37	SES PUSLITBANG POLRI;
38	SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSIAL EKONOMI;
39	KABAGGAKTIBLIN ROPROVOST DIVPROPAM POLRI;
40	KABAGBINPAM ROPAMINAL DIVPROPAM POLRI.

Kriteria Umum Responden Internal Polda

- 1) Pengumpulan data persepsi Sampel 11 Polda (Min. 30% dari total Polda)
- 2) Polda yang ditunjuk sebagai sampel responden:
 - Wilayah Jawa: **Metro, DIY dan Jatim**
 - Wilayah Sumatera: **Sumut dan Bengkulu**
 - Wilayah Kalimantan: **Kaltim dan Kalsel**
 - Wilayah Sulawesi: **Sulsel dan Sulteng**
 - Wilayah Timur: **Papua dan Maluku Utara**
- 3) Responden sudah menduduki jabatan minimal selama 3 (tiga) bulan
- 4) Responden adalah Kasatker Polda atau pejabat yang ditunjuk

No	Fungsi Pembinaan Polda	Jumlah
1.	IRWASDA	1
2.	KARORENA	1
3.	KAROOPS	1
4.	KARO SDM	1
5.	KAROLOG	1
6.	DIREKRIMSUS	1
7.	DIREKRIMUM	1
8.	DIRESNARKOBA	1
9.	DIRLANTAS	1
10.	DIRSABHARA	1
11.	DIRBINMAS	1
12.	DIRPOLAIR	1
13.	DIRPAMOBVIT	1
14.	DANSATBRIMOB	1
15.	KA SPN	1
	JUMLAH	15

Kriteria Umum Responden Eksternal

- 1) Responden pernah berhubungan dengan Satker Mabes Polri
- 2) Daftar ini adalah acuan untuk mengundang responden eksternal, sebisa mungkin dipenuhi keseluruhan kategorinya.

No	Daftar Responden Eksternal	Jumlah
1.	KEMENHUB	1
2.	OMBUDSMAN RI	1
3.	KOMNAS HAM	1
4.	KEMENDAGRI	1
5.	KEMENTERIAN PANRB	1
6.	KEMENKEU	3
7.	DPR RI – Komisi III	2
8.	BAPPENAS	1
9.	BPK	1
10.	KPK	2
11.	KANTOR STAF PRESIDEN	1
12.	ORANG TUA MURID (AKPOL)	6
13.	MEDIA	3
14.	AKADEMISI	3
15.	LEMHANNAS	1
16.	KEMENKOPOLHUKAM	1
17.	KOMPOLNAS	1
18.	KEMENRISTEKDIKTI	1
19.	TNI	1
	JUMLAH	32

2. METODE ITK POLRI

a. Studi Komparasi

Penyusunan ITK dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan studi komparasi pengukuran kinerja kepolisian menggunakan berbagai instrumen evaluasi di berbagai negara di dunia, diantaranya Inggris, Wales, New Zealand, dan Afrika Selatan (*Eupolsa Index*). Hasil studi komparasi di beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja kepolisian didasarkan pada ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi yang diatur di masing-masing negara dengan penerapan standar tata kelola Kepolisian yang baik (*good governance*).

Studi komparasi di negara-negara tersebut juga menemukan acuan pengukuran yang dapat diterapkan untuk mengukur tata kelola Polri. Mastrofski (1999) menyebut ada enam standar tata kelola yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Polri, yaitu:

- 1) *Attentiveness* : tingkat kehadiran Polisi di tengah masyarakat;
- 2) *Reliability* : tingkat kecepatan/cepat tanggap;
- 3) *Responsiveness* : upaya untuk memenuhi permintaan Masyarakat dan memberikan penjelasan terhadap alasan tindakan dan keputusan;
- 4) *Manner* : memperlakukan masyarakat dengan penuh penghargaan;
- 5) *Competence* : kompetensi/kecakapan anggota Polri;
- 6) *Fairness* : perlakuan yang adil terhadap semua tanpa terkecuali.

Selain studi komparasi, penyusunan ITK juga didasarkan hasil pemetaan terhadap hasil studi yang pernah dilakukan terhadap Polri oleh beberapa lembaga, diantaranya; Menteri PANRB, KPK, BPK, UNODC dan Kemitraan. Berdasarkan hasil temuan beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa salah satu isu krusial dalam pengukuran tata kelola Polri adalah untuk melihat sejauh mana capaian program Reformasi Birokrasi yang memiliki tujuan terhadap pembenahan tiga bidang sasaran, yakni: struktural, instrumental dan kultural dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Namun berdasarkan kenyataannya, sejak dicetuskan hingga saat ini aspek kultural menjadi satu-satunya aspek yang paling lamban perubahannya. Jika aspek struktural dan instrumental dapat dilaksanakan melalui instruksi, surat perintah dari atasan, berbeda halnya dengan kultural. Mengingat aspek ini menekankan pada budaya institusi dan perilaku anggota, oleh karenanya dilakukan perubahan *culture set* dan *mind set* yang seringkali membutuhkan keinginan, dan usaha keras untuk berubah, serta waktu yang relatif lama

Dalam konteks ini, sangat penting dalam pengukuran tidak hanya mampu menggambarkan aspek struktural dan instrumental saja, melainkan juga dapat menggambarkan perubahan kultural secara reguler. Untuk itu, diperlukan pengukuran yang mampu menggambarkan empat hal krusial terkait kinerja Polri, sebagai berikut:

- 1) fungsi utama Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002;
- 2) target program Reformasi Birokrasi Polri (RBP);
- 3) menggambarkan tata kelola Polri; dan
- 4) performa Satuan Kerja (Satker) Polri.

Maka Polri berinisiatif untuk melakukan pengukuran terhadap capaian-capaian tersebut dengan menggunakan instrumen **Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK Polri)**.

Pengukuran dilakukan pada level kewilayahan (Polda), karena kualitas RBP di level tersebut secara signifikan menyumbang keberhasilan program secara institusional.

Selain itu, penyusunan ITK juga didasarkan pada hasil penelitian *Indonesia Governance Index (IGI)* yang dilaksanakan oleh Kemitraan (*Partnership for Governance Reform*), dimana dengan *actionable indicator*nya mampu secara cepat menunjukkan kelebihan serta kekurangan tata kelola pemerintahan di sebuah daerah. Sehingga dengan demikian, daerah dapat secara cepat meningkatkan kinerjanya berdasarkan indikator tersebut.

Dengan mempedomani tugas, pokok dan fungsi Polri dilakukan beberapa perubahan mendasar terhadap standar dan pengertian yang ada di Mastrofski, agar dapat menggambarkan kinerja tata kelola Polri yaitu standar *Atentivitas* dan *Reliabilitas* yang dilebur ke dalam prinsip **Responsif** dengan definisi yang lebih luas. Sementara prinsip *Manner* diganti menjadi **Perilaku**, dengan pengertian mencakup *manners*, *feelings*, emosi dan lain-lain. Selain perubahan, ditambahkan 5 (lima) standar tata kelola Polri yang dianggap secara krusial mampu mendorong performa Polri, yakni **Transparansi, Efektivitas, Akuntabilitas, Kompetensi dan Keadilan.**

b. Kuantitatif dengan Analisis dan Observasi Data Objektif

Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK) Polri tersusun dari gabungan indikator yang terdiri dari indikator data objektif dan data observasi. Setiap indikator ini memiliki karakteristik khusus berdasarkan jenis data dan teknik pengumpulan data. Setiap indikator disertai justifikasi yang rinci melalui pertimbangan beberapa faktor yaitu:

- 1) Signifikansi : Mengukur apa yang ingin diukur;
- 2) Relevansi : Mengukur sesuai wewenang Tupoksi dan kinerja;
- 3) Ketersediaan data : Data harus tersedia di semua Polres;
- 4) Kekuatan pembeda : Indikator bisa menangkap perbedaan kondisi;
- 5) Berlaku untuk semua: Berlaku resmi untuk semua Polda/ Polres.

Contoh Form Gabungan Data Objektif dan Observasi
Tingkat Polda

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN RESKRIM UMUM

No	Indikator	Jumlah	Bukti Dukung
1.	Jumlah Personel sesuai DSP		Dokumen Daftar DSP ideal
2.	Jumlah Personel Riil		Dokumen Daftar DSP riil
3.	Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan		Daftar nama personel dan Dikbangspes yang diikuti beserta sertifikat
4.	Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)		Daftar kendaraan R2
5.	Jumlah Kendaraan R4/R6 yang siap operasional (kondisi baik):		Daftar kendaraan R4 dan R6
	a. Sedan		
	b. Minibus		
	c. Truck		
6.	Besaran anggaran Satker:		Bukti dokumen laporan keuangan penetapan dan realisasi dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website 2. Foto laporan keuangan yang ditempelkan di papan pengumuman 3. Dokumen <i>hard copy</i>
	a. Penetapan		
	b. Realisasi		
7.	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri No.... Tahun ... tentang atau SOP tentang...)		Dokumen Pilun/SOP
	a.		
	b.		
8.	Jumlah Piranti Lunak Inisiatif Satker yang pernah diterbitkan Polda (Kapolda dan Direktur)		Dokumen Pilun/SOP inisiatif
9.	Daftar Personel Satker yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana:		Dokumen Daftar nama dan jenis pelanggaran (kode etik, disiplin, dan tindak pidana)
	a. Jumlah pelanggaran kode etik		
	b. Jumlah pelanggaran disiplin		
	c. Jumlah pelanggaran pidana		
10.	Jumlah pejabat struktural Satker Reskrimum berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)		Dokumen struktur organisasi, nama pejabat, dan jenis kelaminnya
11.	Jumlah total pejabat struktural Reskrimum (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)		

12.	Jumlah penyidik berjenis kelamin perempuan di Reskrim Umum		Dokumen jumlah penyidik berdasarkan jenis kelamin
13.	Jumlah total penyidik di Reskrim Umum		
14.	Hasil penilaian LAKIP Satker		Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya
15.	Jumlah penanganan kasus kriminal umum		Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy
16.	Jumlah kasus pidana umum yang P21		Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy
17.	Jumlah kejahatan tindak pidana umum		Daftar jumlah kejahatan di wilayah Polda

**Contoh Form Gabungan Data Objektif dan Observasi
Tingkat Polres**

No	Indikator	Verifikasi (diisi oleh peneliti)	Bukti Dukung
1.	jumlah personel riil dibanding jumlah DSP	Jumlah Personel Riil Personel	1. Daftar personel riil beserta jenis kelamin 2. Daftar Susunan Personel (DSP)
		Jumlah DSP Personel	
2.	Jumlah personel yang memiliki kompetensi Satker ini dibandingkan jumlah personel riil Satker <i>Keterangan: Jika 1 anggota sudah memiliki sertifikat Dikjur, maka tidak perlu dilampirkan Prolat ataupun ijazah</i>	Jumlah Personel yang bersertifikat Dikjur Personel	1. Daftar nama dan jenis dikjur/ pelatihan yang pernah diikuti 2. Kopi/ foto sertifikat personel (Dikjur, sertifikasi, pendidikan formal dan pelatihan terkait)
		Jumlah Personel yang bersertifikat Pelatihan Personel	
		Jumlah Personel yang berijazah S1 Personel	
		Jumlah Personel yang berijazah S2 Personel	
		Jumlah Personel yang berijazah S3 Personel	
3.	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) Satker	Pilun KAPOLRI/WAKAPOLRI (Perkap) buah	1. Daftar Piranti Lunak (Pilun) yang bersumber dari Mabes dan Polda 2. <i>Soft copy</i> dokumen Pilun terkait Tupoksi Satker
		Pilun ASSDM buah	
		Pilun Polda buah	

4.	Berapakah jumlah SOP inisiatif yang dimiliki SUMDA? (Terdiri atas Peraturan Kapolres dan Kabag Sumda)	SOP Inisiatif buah	1. Daftar SOP inisiatif Polres (SOP yang dibuat oleh Kapolres atau Kasat) 2. <i>Soft copy/</i> kopi dokumen SOP inisiatif yang dimiliki Sat Sumda
5.	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/ sekolah/ swasta/ Pemda dan lembaga lain)	Jumlah MoU Kesepakatan	<i>Soft copy</i> MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/ sekolah/ swasta/ Pemda dan lembaga lain)
6.	Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada		Dokumen sidang pelanggaran kode etik, disiplin dan pidana
	a. Jumlah pelanggaran kode etik orang	
	b. Jumlah pelanggaran disiplin orang	
	c. Jumlah pelanggaran pidana orang	
7.	Tingkat Keterbukaan anggaran	0=Tidak dapat diakses 1=Diakses dengan prosedur tertentu 2=Terpampang di depan kantor tapi hanya salah satu angka penetapan/perubahan/realisasi 3=Terpampang di depan kantor tapi hanya kurang realisasi 4=Laporan diunggah di website/blogspot, lengkap tapi bukan rutin tahunan 5=Dapat diaksesnya melalui website, lengkap dan rutin tahunan	Personel Bagsumda Polres dan Biro TI
8.	Berapa jumlah DIPA anggaran beserta Realisasi/ Serapan Tahun Anggaran 2016. lampirkan bukti dukung yang relevan?	Jumlah DIPA 2016 rupiah	Dokumen DIPA Anggaran, revisi dan RKAL realisasi belanja barang (per tahun)
		Realisasi Belanja 2016 (serapan) rupiah	
9.	Berapa Jumlah Polwan yang menduduki jabatan struktural dari total seluruh pejabat di Satker ini (1 Kabag, 3 Kasubag, 7 Paur)?	Jumlah Polwan menduduki jabatan struktural orang	1. Struktur organisasi 2. Daftar nama dan jenis kelamin pejabat struktural
		Jumlah total pejabat struktural orang	

10.	Jumlah personel Bagsumda yang bertugas sebagai penasihat hukum dibandingkan personel riil	Jumlah penasihat hukum Polres dengan Sprin/SK/Peraturan Kapolres orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar personel Bagsumda yang bertugas sebagai pendamping /penasehat (psikolog, konselor) 2. Kep/Sprin penunjukan sebagai pendamping /penasihat 3. Daftar total pegawai Polres
		Jumlah total personel Polres orang	
11.	Berapakah jumlah personel Bagsumda yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa?	Jumlah personel yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar personel Bagsumda yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari LKPP 2. Bukti fotokopi sertifikat dari LKPP
12.	Berapakah jumlah pengaduan-pengaduan yang disampaikan ke Bagsumda?	Jumlah pengaduan masuk Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar pengaduan personalia yang masuk ke Bagsumda 2. Daftar pengaduan /masalah yang ditangani
		Jumlah yang ditangani Kasus	
13.	Apakah usulan mutasi di lingkungan Polres dibuat secara rutin 6 bulan sekali? (Sesuai Perkap No. 16 Tahun 2012) Mohon lingkari salah satu jawaban dan lampirkan bukti dokumen yang relevan	<p>0=tidak tersedia 1=tersedia namun tidak rutin; 2=tersedia dan rutin (setahun 2 kali) tetapi tidak menjadi pertimbangan pimpinan (hasil selalu berubah dari usulan); 3=tersedia, rutin dan terkadang menjadi pertimbangan pimpinan; 4=tersedia, rutin dan selalu menjadi pertimbangan pimpinan</p> <p>..... (mohon dipilih salah satu)</p>	Daftar usulan mutasi personel Polres per semester
14.	Bagaimana Polres mengupayakan rekrutmen putra daerah untuk menjadi anggota Polri? Mohon lingkari salah satu dan lampirkan dengan bukti dukung yang relevan.	<p>0=tidak ada upaya 1=ada upaya dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah 2=ada upaya dengan mengirimkan usulan 3=ada upaya dengan mengirimkan usulan dan melakukan pelatihan khusus (pembekalan/ <i>try out</i>) bagi putra daerah</p> <p>..... (mohon dipilih salah satu)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti foto kegiatan 2. Laporan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk putra daerah 3. Dokumen usulan calon anggota Polri dari putra daerah

15.	Bagaimana implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN. Mohon lingkari salah satu jawaban dan lampirkan bukti data yang membuktikan jawaban tersebut?	<p>0=Sistem sudah didapat dari pusat namun belum terinstal atau belum ada SDM yang mampu menjalankannya.</p> <p>1=Data sudah menggunakan sistem pusat tetapi pencatatan di lapangannya masih manual</p> <p>2=Data dapat diaksesnya tetapi bergantung hanya pada 1 orang saja dan jika orang ini tidak masuk maka data tidak dapat diakses.</p> <p>3=Data dapat diakses tetapi hanya menunjukkan posisi akhir, tidak ada pencatatan kapan barang masuk dan keluar.</p> <p>4=Sistem pusat berjalan dan sistem di lapangan juga berjalan dengan rapi, rutin dan dapat diakses oleh siapapun namun belum ada pencatatan <i>aset recovery</i>.</p> <p>5=Sistem <i>e-asset</i> management terupdate, real time, lengkap dan transparan</p>	<p>..... (mohon dipilih salah satu)</p> <p>Laporan SIMAK BMN</p>
16.	Laporan Annev Tahun 2016	<p>0=tidak ada laporan</p> <p>1=ada laporan namun tidak lengkap</p> <p>2=ada laporan lengkap namun tidak ada analisa trend</p> <p>3=ada laporan lengkap disertai analisa dan rekomendasinya</p>	<p>..... (mohon dipilih salah satu)</p> <p>Salinan/kopi laporan Anev</p>

c. Kualitatif Dengan Analisis Data Persepsi

Pada tingkat Polda dan Polres, terdapat dua jenis responden yang dijadikan sebagai responden pengumpulan data persepsi, internal dan eksternal (narasumber terpilih) yang kriterianya ditentukan bersama oleh tim peneliti ITK dan Mabes Polri. Responden dipilih secara purposif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebagaimana tabel di bawah ini.

1) Kriteria Umum Responden Internal

- a. responden dari 11 Satfung yang ada di Polres (Sumda, Reskrim, Resnarkoba, Lantas, Binmas, Sabhara, Intelkam, Propam, SPKT, Bagops, dan Bagren) dan tambah 1 Polair untuk wilayah perairan;
- b. terdiri dari 36 responden 1 Perwira dan 2 Brigadir;
- c. minimal bertugas selama 6 bulan di Satfung.

Contoh Daftar Responden Internal Polda dan Polres

No	Satfung	Jumlah
1.	SDM/ Sumda	3
2.	Reskrim	3
3.	Narkoba	3
4.	Sabhara	3
5.	Intelkam	3
6.	Lantas	3
7.	SPKT	3
8.	Binmas	3
9.	Ops	3
10.	Ren	3
11.	Propam	3
12.	Polair	3
Total		36

Contoh Daftar Responden Eksternal Polda dan Polres

No	Jenis Responden	Kriteria Khusus	Jumlah
1.	Tokoh Agama (Mayoritas dan Minoritas)	Merupakan tokoh agama yang paling berpengaruh di Kota/Kabupaten (perwakilan dari 2 agama) mewakili Agama Mayoritas dan Minoritas	2
2.	Tokoh Masyarakat/Adat	Merupakan tokoh masyarakat/adat yang paling berpengaruh di Kota/Kabupaten	2
3.	DPRD Kabupaten/Kota	Pimpinan/Anggota DPRD	2
4.	Kejaksaan Negeri	Kasi Pidana Umum atau pejabat eselon tiga yang mewakili/Penuntut Umum	1
5.	Akademisi	Ahli bidang hukum/kepolisian/ kebijakan publik yang berasal dari universitas/lembaga pendidikan setara dengan perguruan tinggi dengan reputasi baik di Kota/Kabupaten	2
6.	Media Massa	Wartawan/koresponden media cetak atau elektronik dengan Oplah/Pemirsa Terbesar	2
7.	Organisasi Masyarakat	Pimpinan Organisasi massa dengan anggota paling besar di Kota/Kabupaten misalnya: NU, Muhammadiyah dll (perwakilan harus dari 2 Ormas yang berbeda)	2
8.	FKUB	Pimpinan dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama	5
9.	Pemerintah Daerah	Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan atau Staf Ahli Bupati/Walikota	1
10.	Kesbangpol	Kepala Kesbangpol atau pejabat eselon 3 yang mewakili	1
11.	Badan Pertanahan Nasional/ Daerah	Kepala BPN Kabupaten/Kota atau pejabat eselon 3 yang mewakili	1
12.	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial atau pejabat eselon 3 yang mewakili	1
13.	Badan Intelijen Daerah (BINDA)	Pimpinan/Perwakilan BIN Kabupaten/ Kota	1
14.	Pasiintel Kodim dan Babinsa TNI AD	Pasiintel Kodim dan Perwakilan Babinsa TNI AD	2
15.	Asosiasi Pengusaha Perkebunan /Tambang/Konstruksi	Pengurus Asosiasi atau anggota aktif Asosiasi Pengusaha Perkebunan/Tambang/Konstruksi	2
16.	Organisasi Kepemudaan	Pimpinan atau pengurus aktif organisasi kepemudaan (lebih dari 2 tahun) contoh HMI, GMNI, KNPI dan sejenisnya.	2
17.	LSM Pemerhati Isu Toleransi, SARA, Perkebunan dan Kehutanan	Pimpinan atau pengurus aktif LSM Pemerhati Isu Toleransi, SARA, Perkebunan dan Kehutanan	3
Total Responden			32

**Contoh Kuesioner Survei Evaluasi Kinerja Polri Tingkat Polres
Responden Eksternal**

1. Tingkat Toleransi & Perilaku Polisi

Beri tanda silang (X) pada jawaban anda sesuai dengan Pengetahuan dan Pengalaman anda. Adapun ketentuan penilaian berikut ini:

1= Sangat Tidak Setuju (STS)

2= Tidak Setuju (TS)

3= Kurang Setuju (KS)

4= Setuju (S)

5= Sangat Setuju (SS)

No	Isu	Sangat Tidak Setuju ————— Sangat Setuju				
		①	②	③	④	⑤
1.	Polisi boleh menerima uang tambahan atau uang rokok sebagai rasa terima kasih untuk mempercepat proses pelayanan publik	①	②	③	④	⑤
2.	Polisi boleh menerima uang terima kasih karena memperlancar proses perekrutan menjadi anggota Polri.	①	②	③	④	⑤

d. Layanan Publik

Observasi standar pelayanan publik minimum menuju pelayanan optimal dilakukan pada layanan pengurusan antara lain SIM, BPKB, STNK, SKCK, SPKT dan lain-lain.

Pengukuran ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM dan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang SKCK. Skor hasil observasi pelayanan publik diukur menggunakan data gabungan antara hasil observasi layanan publik oleh peneliti ITK dengan tingkat kerawanan hasil persepsi eksternal.

**EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
SATPAS SIM**

Nama Instansi :

Nama Unit Pelayanan :

Periode Evaluasi :

Evaluator :

NO	INDIKATOR	ATRIBUT	NILAI	KRITERIA DASAR	KET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
Permen PANRB No. 15 Tahun 2014					
1	Tersedianya Regulasi Standar Pelayanan (SP) penyelenggaraan pelayanan public	Tersedianya 10 atau lebih regulasi SP Tersedianya 7-9 regulasi SP Tersedianya 4-6 regulasi SP Tersedianya 1-3 regulasi SP Tidak ada regulasi SP	40 30 20 10 0	Tunjukkan regulasi tentang SP: 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Yanlik 2. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan 3. PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis PNBPN yang berlaku pada Polri 4. Permen PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Juknis Penetapan dan penerapan SP 5. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman SP 6. Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang IKM 7. Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM 8. Kep Kakorlantas Nomor 70 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji SIM 9. Peraturan/SOP Kapolda 10. Peraturan/SOP Dirlantas 11. Peraturan/SOP Kapolres 12. SOP Kasatlantas	Cukup Jelas

e. Pembobotan Tingkat Indikator dan Standar

Pembobotan ITK menggunakan metode *Analytical Hierarchy Procedure (AHP)*. Metode ini digunakan untuk menentukan bobot standar dan indikator. AHP mendasarkan pada penilaian para ahli untuk menetapkan prioritas standar dan indikator mana yang diyakini paling menentukan dalam peningkatan kinerja tata kelola atau *'pair-ways comparison'* antar standar dan indikator. Teknik Pembobotan memiliki tiga alternatif metode yaitu:

- 1) Teknik Abrbitrary: Bobot ditentukan oleh Peneliti;
- 2) Teknik Pembobotan Menggunakan Statistik Non-Parametrik atau Factor Analysis; dan
- 3) Teknik Pembobotan dengan Metode AHP.

Secara teknis studi Pembobotan dilakukan paralel dengan ITK. Beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian saat melakukan pembobotan antara lain:

- 1) Kerangka: *Analytical Hierarchy Procedures* berdasarkan struktur IGI;
- 2) Metode Pengumpulan Data: *In-Depth Interview*;
- 3) Instrumen: Kuesioner berdasarkan hierarki AHP;
- 4) Responden: Expert yaitu orang-orang yang paham benar mengenai seluk beluk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan sering terlibat atau berpengalaman dalam pemerintahan. Wawancara terhadap responden dilakukan di tingkat pusat dan daerah;
- 5) Penghitungan bobot dilakukan dengan *Software Expert Choice*; dan
- 6) Uji inkonsistensi dilakukan sebagai kontrol terhadap tingkat robustness jawaban responden.

3. STANDAR PENGUKURAN TATA KELOLA POLRI

Standar pengukuran Tata Kelola Polri meliputi 7 (tujuh) standar yaitu Kompetensi, Responsif, Perilaku, Transparansi, Keadilan, Efektivitas dan Akuntabilitas yang terbagi dalam 2 (dua) indikator ITK tingkat Polda dan Polres dan 1 (satu) indikator asesmen organisasi tingkat Satker Mabes Polri, yaitu:

a. Indikator Asesmen Organisasi Satker Mabes Polri

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
SSDM					
Kompetensi					
1.	M1K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SDM berbanding personel riil SSDM	√		
2.	M1K2	Persentase jumlah pejabat yang memiliki kompetensi manajerial berbanding seluruh pejabat SSDM	√		
3.	M1K3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) SSDM yang bersumber dari Mabes Polri	√		
4.	M1K4	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa	√		
5.	M1K5	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan bimbingan psikolog/konselor berbanding personel Mabes	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
Responsif					
6.	M1R1	Tingkat inisiatif SSDM untuk mengimplementasikan kebijakan <i>local boy local job</i> bagi Bintara khusus pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar			√
7.	M1R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki SSDM	√		
8.	M1R3	Inisiatif untuk melakukan supervisi, verifikasi atau sosialisasi kepada Polda atau Polres terkait fungsi SDM Polri			√
9.	M1R4	Implementasi sistem manajemen kinerja (<i>performance evaluation</i>) personel SSDM per semester			√
10.	M1R5	Kecepatan anggota dalam melayani berkas tanda jasa, pengakhiran dinas dan/atau pendidikan.			√
11.	M1R6	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/KL dan lembaga lain yang relevan untuk menunjang kinerja)	√		
12.	M1R7	Laporan Kajian RB yang merupakan inisiatif dari SSDM	√		
Perilaku					
13.	M1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana (tempat asal Satker personel melakukan pelanggaran)	√		
14.	M1P2	Kerawanan permintaan uang pelicin saat mengurus kenaikan jabatan, pangkat, berkas tanda jasa dan atau pendidikan (pengembangan atau pelatihan di SSDM)			√
15.	M1P3	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota SSDM ketika mengurus jabatan (IIIA1 keatas dan Kapolres), kenaikan pangkat, berkas tanda jasa dan atau pendidikan pengembangan atau pelatihan			√
16.	M1P4	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Transparansi					
17.	M1T1	Tingkat Keterbukaan anggaran SSDM		√	
18.	M1T2	Keterbukaan informasi kebijakan (kuota) pendidikan		√	
19.	M1T3	Tingkat keterbukaan proses rekrutmen pendidikan Perwira (Akp, SIPSS), Bintara dan Tamtama		√	
20.	M1T4	Tingkat keterbukaan informasi asesmen seleksi pendidikan pengembangan (Sespim)		√	
21.	M1T5	Keterbukaan prosedur mengikuti seleksi pendidikan pengembangan spesialisasi		√	
22.	M1T6	Keterbukaan prosedur asesmen jabatan terbuka		√	
23.	M1T7	Keterbukaan prosedur seleksi penugasan khusus		√	
24.	M1T8	Keterbukaan prosedur mengajukan kenaikan pangkat		√	
25.	M1T9	Keterbukaan prosedur layanan hak-hak anggota Polri		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
26.	M1T10	Keterbukaan informasi hasil tes psikologi dalam seleksi pendidikan PTIK, Sespima, Sespimen, Sespimti, Lemhanas dan Diklat PIM		√	
27.	M1T11	Update Rencana mutasi Personel dibuat secara rutin minimal 1 bulan sekali. (Sesuai Perkap Nomor 16 Tahun 2012) Mohon lingkari salah satu jawaban dan lampirkan bukti dokumen yang relevan?	√		
Keadilan (Fairness)					
28.	M1F1	Keadilan dalam penentuan kuota seleksi Dikbang (proporsional sesuai dengan animo)			√
29.	M1F2	Keadilan dalam penentuan pola penempatan pendidikan pembentukan (sesuai dengan kebutuhan personel/ hasil Anev ruang jabatan)			√
30.	M1F3	Keadilan dalam mutasi jabatan IIIA1 ke atas dan Kapolres			√
31.	M1F4	Keadilan dalam hal pelaksanaan asesmen seleksi pendidikan pengembangan (peserta asesmen)			√
32.	M1F5	Keadilan dalam hal pelaksanaan asesmen seleksi jabatan terbuka eselon II (peserta asesmen)			√
33.	M1F6	Keadilan pemenuhan hak anggota			√
Efektivitas					
34.	M1E1	Tingkat serapan anggaran SSDM	√		
35.	M1E2	Efektivitas pelaksanaan analisa beban kerja			√
36.	M1E3	Implementasi sistem manajemen kinerja (performance evaluation) personel SSDM per semester	√	√	
37.	M1E4	Efektivitas proses seleksi dan rekrutmen			√
38.	M1E5	Implementasi lelang jabatan terbuka (eselon II)		√	
39.	M1E6	Kesesuaian kompetensi sesuai dengan penugasan/jabatan IIIA1 ke atas			√
40.	M1E7	Efektivitas pembekalan pensiun tingkat Mabes (program latihan keterampilan)			√
41.	M1E8	Jumlah <i>profiling</i> dibandingkan rencana	√		
42.	M1E9	Jumlah <i>trauma healing</i> dibandingkan rencana	√		
43.	M1E10	Jumlah penyalahgunaan Senpi dibanding rekomendasi psikologi yang dikeluarkan oleh SSDM	√		
44.	M1E11	Efektivitas bantuan teknis ke satker operasional			√
45.	M1E12	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
46.	M1E13	Jumlah konseling kepada anggota dan keluarga khusus Mabes	√		
47.	M1E14	Rekrutmen putra daerah untuk menjadi anggota Polri	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
48.	M1E15	Rasio antara Jumlah pengaduan yang disampaikan ke SSDM dibandingkan dengan yang ditangani	√		
49.	M1E16	Penentuan kuota seleksi Dikbang (proporsional sesuai dengan animo)	√		
50.	M1E17	Penentuan pola penempatan pendidikan pembentukan (sesuai dengan kebutuhan personel/hasil Anev ruang jabatan)	√		
51.	M1E18	Efektivitas pelaksanaan analisa beban kerja	√		
Akuntabilitas					
52.	M1A1	Laporan Anev 2017		√	
53.	M1A2	Laporan hasil kegiatan seleksi		√	
54.	M1A3	Laporan hasil kegiatan rekrutmen		√	
55.	M1A4	Laporan hasil kegiatan penempatan pertama Polri dan PNS		√	
56.	M1A5	Laporan PNBP Pelayanan Penyelenggaraan <i>Assessment Center</i>		√	
57.	M1A6	Sistem Informasi Personel Polri (SIPP)		√	
58.	M1A7	Anev pelaksanaan pelayanan hak		√	
59.	M1A8	Laporan hasil mapping psikologi anggota		√	
60.	M1A9	Laporan pelaksanaan tes psikologi calon pemegang Senpi organik		√	
61.	M1A10	Laporan hasil tes psikologi seleksi dan psikologi rekrutmen		√	
62.	M1A11	Laporan pelaksanaan PKP (profil klinis personel)		√	
63.	M1A12	Laporan pelaksanaan konseling		√	
64.	M1A13	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	√		
65.	M1A14	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
ITWASUM					
Kompetensi					
1.	W1K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan umum berbanding personel riil Itwasum Polri	√		
2.	W1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Bidang manajerial terhadap jabatan struktural (sampai dengan level Kasubag)	√		
3.	W1K3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilon) Itwasum Polri	√		
4.	W1K4	Tingkat pemahaman Auditor terhadap materi objek pengawasan dan pemeriksaan.			√
5.	W1K5	Kesesuaian kompetensi penugasan auditor terhadap objek wasrik			√
6.	W1K6	Jumlah personel Itwasum yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	√		
7.	W1K7	Hasil penilaian Dalmutu terhadap Auditor	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
Responsif					
8.	W1R1	Tingkat inisiatif Itwasum Polri untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat			√
9.	W1R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Itwasum	√		
10.	W1R3	Kecepatan Itwasum dalam merespons kebutuhan asistensi dan konsultasi terkait dengan hasil temuan BPK di Satker Polri			√
11.	W1R4	Kecepatan proses Audit (terstruktur) sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan			√
12.	W1R5	Kecepatan proses Audit investigasi (khusus) sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan			√
13.	W1R6	Kecepatan proses Reviu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.			√
14.	W1R7	Kecepatan Evaluasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.			√
15.	W1R8	Jumlah MoU Kemitraan dengan eksternal	√		
16.	W1R9	Kecepatan penyampaian kisi-kisi yang akan menjadi sasaran Wasrik kepada Satker			√
17.	W1R10	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	√		
Perilaku					
18.	W1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana (tempat asal Satfung personel melakukan pelanggaran).	√		
19.	W1P2	Independensi pelaksanaan audit	√		√
20.	W1P3	Sikap auditor pada saat melakukan Wasrik (arogansi)			√
21.	W1P4	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
22.	W1P5	Rasio Auditor yang melaporkan LKHPN terhadap total Auditor	√		
Transparansi					
23.	W1T1	Tingkat keterbukaan anggaran Itwasum Polri		√	
24.	W1T2	Transparansi objek yang akan di Wasrik		√	
25.	W1T3	Transparansi daftar tim Wasrik kepada Satker sebelum pelaksanaan audit		√	
26.	W1T4	Kejelasan prosedur wasrik		√	
27.	W1T5	Transparansi pemaparan temuan wasrik kepada Satker pada saat taklimat akhir		√	
28.	W1T6	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Quick wins)	√		
Keadilan (Fairness)					
29.	W1F1	Keadilan dalam penugasan sebagai auditor, dari sisi tempat dan objek audit			√
30.	W1F2	Perlakuan yang sama terhadap aduan masyarakat tanpa melihat latar belakang yang mengadukan.			√
31.	W1F3	Kesempatan yang sama diberikan oleh Itwasum ke Polda untuk mendapatkan Bimtek			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
Efektivitas					
32.	W1E1	Tingkat serapan anggaran Itwasum Polri	√		
33.	W1E2	Opini hasil audit BPK atas laporan keuangan Polri	√		
34.	W1E3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap total pengaduan masyarakat selama setahun terakhir	√		
35.	W1E4	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
36.	W1E5	Hasil penilaian kapabilitas APIP Polri	√		
37.	W1E6	Rekapitulasi hasil audit investigasi	√		
38.	W1E7	Rekapitulasi Hasil Reviu	√		
39.	W1E8	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
40.	W1E9	Laporan Anev Tahun 2017	√		
41.	W1E10	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester	√		
Akuntabilitas					
42.	W1A1	Kualitas Hasil Pemeriksaan (Audit) Itwasum Polri		√	
43.	W1A2	Kualitas laporan hasil pemantauan		√	
44.	W1A3	Kualitas laporan Dumas		√	
SOPS					
Kompetensi					
1.	O1K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SOPS berbanding personel riil SOPS	√		
2.	O1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Bidang manajerial terhadap jabatan struktural (sampai dengan level Kasubbag)	√		
3.	O1K3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) SOPS yang bersumber dari Mabes Polri	√		
4.	O1K4	Dukungan sistem teknologi informasi manajemen data dan pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas		√	
5.	O1K5	Jumlah personel yang memiliki kompetensi (sertifikasi) pengadaan barang	√		
Responsif					
6.	O1R1	Kegiatan monitoring media (cetak dan elektronik) yang menjadi perhatian publik		√	
7.	O1R2	Kecepatan Satker SOPS dalam merumuskan (menetapkan) kegiatan operasi kepolisian terpusat			√
8.	O1R3	Tingkat inisiatif SOPS dalam melakukan sosialisasi hasil kajian			√
9.	O1R4	Intensitas rapat koordinasi penanggulangan gangguan Kamtibmas	√		
10.	O1R5	Frekuensi koordinasi multi stakeholder dalam updating gangguan Kamtibmas	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
11.	O1R6	Pemuktahiran Peta dan Kerawanan Gangguan Kamtibmas (konflik sosial yang mengarah kontijensi)	√		
12.	O1R7	Dokumentasi pilun inisiatif yang dimiliki terutama SOP terkait dengan pelaksanaan Operasi Kepolisian	√		
13.	O1R8	Intensitas pelaksanaan kegiatan supervisi ke kesatuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian dan kegiatan operasi kepolisian.	√		
14.	O1R9	Analisa dan evaluasi operasi terhadap pelaksanaan Operasi terpusat dan kewilayahan		√	
15.	O1R10	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/Pemda dan sejenisnya baik di dalam negeri maupun luar negeri)	√		
16.	O1R11	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	√		
Perilaku					
17.	O1P1	Jumlah personel Satker Sops yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	√		
18.	O1P2	Sikap personel pada saat melakukan supervisi ke kesatuan wilayah dalam rangka kegiatan operasi kepolisian dan monitoring gangguan Kamtibmas (Dalops, Kerma)			√
19.	O1P3	Potensi penyelewengan anggaran pada pengadaan dukungan operasi dan Sarpras – penggunaan dana kontijensi			√
20.	O1P4	Pembinaan karier personel bebas dari praktik KKN			√
21.	O1P5	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Keadilan					
22.	O1F1	Keadilan dalam memberikan supervisi kepada Roops Polda terkait pelaksanaan fungsi.			√
23.	O1F2	Kesempatan yang sama diusulkan mengikuti pendidikan pengembangan (pembinaan karier)			√
Efektivitas					
24.	O1E1	Koordinasi data gangguan Kamtibmas antara Roops dan Sops Mabes dalam pendataan gangguan Kamtibmas			√
25.	O1E2	Persentase serapan anggaran Satker Sops	√		
26.	O1E3	Tingkat gangguan Kamtibmas yang berhasil diredam/diselesaikan melalui operasi kepolisian.	√		
27.	O1E4	Jumlah produk Laporan Gangguan Kamtibmas yang berkaitan dengan isu konflik sosial	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
28.	O1E5	Efektivitas tingkat koordinasi antara Satker Sops dengan Satker lainnya seperti Baharkam (Sabhara, Binmas, Polairud), Reserse, Intelkam, Lantas, Humas, Brimob dan Dokkes			√
29.	O1E6	Efektivitas pelaksanaan operasi kepolisian			√
30.	O1E7	Efektivitas supervisi ke kesatuan wilayah terkait kegiatan operasi kepolisian terpadu			√
31.	O1E8	Nilai LKIP Kemenpan terhadap Polri	√		
Akuntabilitas					
32.	O1A1	Laporan Anev 2017		√	
33.	O1A2	Kajian akademik sebagai basis pembuatan kebijakan		√	
34.	O1A3	Laporan data dan peta gangguan kamtibmas		√	
35.	O1A4	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester		√	
36.	O1A5	Keberadaan laporan penyelenggaraan kerjasama antara Polri dengan Kementerian/lembaga (KL) dalam dan luar negeri		√	
37.	O1A6	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
38.	O1A7	Laporan Anev Hasil Operasi Tahun 2017	√		
39.	O1A8	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	√		
40.	O1A9	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester	√		
41.	O1A10	Laporan Standar kebutuhan minimal peralatan Polri sesuai dengan karakteristik wilayah.	√		
42.	O1A11	Laporan daftar barang persediaan (ideal per semester)	√		
43.	O1A12	Laporan kemajuan pembuatan standar bangunan Polri per tipe (2010)	√		
Transparansi					
44.	O1T1	Tingkat keterbukaan anggaran Satker SOPS		√	
45.	O1T2	Tingkat keterbukaan anggaran untuk Operasi Kepolisian Rutin		√	
46.	O1T3	Kemudahan mengakses data gangguan Kamtibmas		√	
47.	O1T4	Keterbukaan informasi rencana operasi kepolisian		√	
48.	O1T5	Transparansi prosedur pengadaan barang dan jasa dalam/luar negeri	√		
49.	O1T6	Keterbukaan informasi terkait barang dan jasa yang akan dilelang dalam kurun waktu satu tahun anggaran	√		
50.	O1T7	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Quick Wins)	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
SRENA					
Kompetensi					
1.	Z1K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Bidang Perencanaan Umum dan Penganggaran berbanding personel riil sesuai level tertentu	√		
2.	Z1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajerial terhadap jabatan struktural (sampai dengan level Kasubag)	√		
3.	Z1K3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas perencanaan umum dan anggaran Polri	√		
4.	Z1K4	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengadaan barang	√		
Responsifitas					
5.	Z1R1	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Satker Srena	√		
6.	Z1R2	Kecepatan menyampaikan usulan kebutuhan logistik dari Satker/Satwil.			√
7.	Z1R3	Jumlah MoU Kemitraan dengan intitusi dalam negeri dan MoU dengan institusi Luar Negeri	√		
8.	Z1R4	Kecepatan membuat kajian dan kebijakan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan eksternal			√
9.	Z1R5	Inisiatif dalam melakukan pendampingan Satker dan wilayah dalam proses penganggaran			√
10.	Z1R6	Inisiatif Kegiatan pembekalan teknis kepada Satker dan wilayah dalam pelaksanaan Refomasi Birokrasi			√
11.	Z1R7	Kecepatan dan ketelitian dalam memproses revisi anggaran.			√
12.	Z1R8	Laporan Kajian RB yang merupakan inisiatif dari Srena		√	
13.	Z1R9	Kecepatan Srena dalam melaksanakan supervisi hasil pengukuran kinerja Satker/ Polda			√
14.	Z1R10	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) personel per semester		√	
Perilaku					
15.	Z1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana (tempat asal Satfung personel melakukan pelanggaran)	√		
16.	Z1P2	Kerawanan permintaan uang pelicin saat mengurus kenaikan pangkat, berkas tanda jasa dan atau pendidikan (kejuruan atau pelatihan) Proses pembinaan karier personel Srena bebas dari praktik KKN			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
17.	Z1P3	Proses memasukkan kebutuhan anggaran ideal dari masing-masing satker dan wilayah bersih dari praktik KKN dan intervensi			√
18.	Z1P4	Objektivitas dan integritas dalam pembinaan organisasi dan tata laksana Satker dan Wilayah			√
19.	Z1P5	Integritas dalam melakukan analisa laporan.			√
20.	Z1P6	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
21.	Z1P7	Sikap personel Srena dalam pelaksanaan pembekalan teknis kepada Satker di wilayah			√
Transparansi					
22.	Z1T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Satker Srena		√	
23.	Z1T2	Tingkat keterbukaan informasi untuk mendapatkan pembinaan karier (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan dan lain sebagainya)		√	
24.	Z1T3	Kemudahan mengakses publikasi Kajian Kemampuan dan Keamanan Polri		√	
25.	Z1T4	Publikasi pengelolaan utang luar negeri maupun dalam negeri yang dikelola oleh Srena Polri		√	
26.	Z1T5	Kemudahan mengakses laporan monitoring dan evaluasi (Monev)		√	
27.	Z1T6	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker		√	
28.	Z1T7	Kemudahan mengakses dokumen Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		√	
Keadilan					
29.	Z1F1	Kesempatan bagi Personel Srena diusulkan mendapatkan pendidikan pengembangan dan pelatihan			√
Efektivitas					
30.	Z1E1	Tingkat serapan anggaran Satker Srena	√		
31.	Z1E2	Kualitas pendampingan yang dilakukan oleh Srena terhadap Satker dan wilayah terkait proses penyusunan anggaran			√
32.	Z1E3	Kinerja Srena dalam meningkatkan anggaran Polri			√
33.	Z1E4	Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang secara cukup, efisien, dan aman	√		
34.	Z1E5	Rekomendasi Monev yang ditindaklanjuti dengan program-program dan kebijakan			√
35.	Z1E6	Perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tubuh Polri			√
36.	Z1E7	Kesesuaian antara realisasi program dengan dokumen perencanaan			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
37.	Z1E8	Implementasi <i>E-Budgeting</i> dan <i>E-Planing</i>			√
40.	Z1E9	Penerapan Analisa Beban Kerja sesuai dengan jabatannya		√	
41.	Z1E10	Efektivitas aplikasi yang dibuat oleh Srena untuk pelaporan pelaksanaan program kegiatan Srena			√
42.	Z1E11	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
Akuntabilitas					
43.	Z1A1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan Penyalurannya		√	
44.	Z1A2	Kualitas Laporan Anev 2017		√	
45.	Z1A3	Laporan penerimaan PNBPN dari Polri		√	
46.	Z1A4	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester		√	
47.	Z1A5	Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap fungsi dan Polri secara keseluruhan		√	
48.	Z1A6	Laporan analisa jabatan sebagai dasar untuk penempatan personel		√	
SLOG					
Kompetensi					
1.	G1K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Slog Polri berbanding personel riil Slog Polri	√		
2.	G1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajerial terhadap jabatan struktural (sampai dengan level Kasubbag)	√		
3.	G1K3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Slog Polri yang bersumber dari Mabes Polri	√		
4.	G1K4	Jumlah personel Slog Polri yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	√		
Responsif					
5.	G1R1	Kecepatan proses pengadaan barang dan jasa dalam/luar negeri			√
6.	G1R2	Respon Slog Mabes dalam menanggapi permintaan asistensi teknis/supervisi ke wilayah.			√
7.	G1R3	Supervisi yang dilakukan Slog kepada rekanan (pemenang tender) dalam pendistribusian perbekalan umum ke Satker/Satwil			√
8.	G1R4	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Slog Polri	√		
9.	G1R5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/Pemda dan sejenisnya)	√		
10.	G1R6	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
Perilaku					
11.	G1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana (tempat asal Satker personel melakukan pelanggaran)	√		
12.	G1P2	Kerawanan permintaan uang pelicin saat melakukan pengadaan barang dan jasa			√
13.	G1P3	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota SLOG POLRI ketika melakukan pengadaan barang dan jasa			√
14.	G1P4	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Transparansi					
15.	G1T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Slog Polri		√	
16.	G1T2	Transparansi prosedur pengadaan barang dan jasa dalam/luar negeri.		√	
17.	G1T3	Keterbukaan informasi terkait barang dan jasa yang akan dilelang dalam kurun waktu satu tahun anggaran		√	
18.	G1T4	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan Quick Wins)	√		
Keadilan (Fairness)					
19.	G1F1	Keadilan dalam proses lelang (siapa saja bisa mendaftar asalkan memenuhi kualifikasi)			√
20.	G1F2	Kesempatan yang sama yang diberikan oleh Slog ke Polda untuk mendapatkan Supervisi			√
Efektivitas					
21.	G1E1	Tingkat serapan anggaran Slog Polri	√		
22.	G1E2	Tingkat kesesuaian jumlah paket pengadaan barang dan jasa tahun 2017 (dibandingkan rencana pengadaan)	√		
23.	G1E3	Perbedaan waktu penyelesaian laporan aplikasi SIMAK-SAIBA (Puskeu) dengan waktu yang ditetapkan.	√		
24.	G1E4	Tingkat koordinasi antara Slog dan Puskeu terkait pengelolaan SIMAK dan SAIBA			√
25.	G1E5	Tingkat Koordinasi Slog dengan Srena dalam hal perencanaan kebutuhan barang dan jasa.			√
26.	G1E6	Aturan pembagian kewenangan pengadaan barang dan jasa antara Mabes, Polda dan Satker di bawahnya.			√
27.	G1E7	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
Akuntabilitas					
28.	G1A1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan SAIBA (Sistem Akuntansi dan Informasi Berbasis Anggaran)		√	
29.	G1A2	Laporan Anev 2017		√	
30.	G1A3	Laporan LHKPN		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
31.	G1A4	Laporan rencana kebutuhan logistik (pagu ideal)		√	
32.	G1A5	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).		√	
33.	G1A6	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester		√	
34.	G1A7	Laporan Standar kebutuhan minimal peralatan Polri sesuai dengan karakteristik wilayah.		√	
35.	G1A8	Laporan daftar barang persediaan (ideal per smester).		√	
36.	G1A9	Laporan kemajuan pembuatan standar bangunan Polri per tipe (2010)	√		
LEMDIKLAT					
Kompetensi					
1.	L1K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang Perencanaan Umum dan Penganggaran berbanding personel riil	√		
2.	L1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajerial terhadap jabatan struktural (sampai dengan level Kasubbag)	√		
3.	L1K3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Lemdiklat yang bersumber dari Mabes Polri	√		
4.	L1K4	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajemen SDM terhadap jumlah personel Rorenmin Lemdiklat Polri	√		
5.	L1K5	Jumlah personel Lemdiklat Polri yang memiliki kopetensi dalam pengelolaan logistik.	√		
6.	L1K6	Jumlah personel yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan profesi	√		
7.	L1K7	Jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam pelaporan akuntabilitas kinerja Satker.	√		
8.	L1K8	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan kepustakaan.	√		
9.	L1K9	Dukungan Teknologi Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi Diklat (<i>e-office</i>)		√	
10.	L1K10	Jumlah personel Rokurlum dan Rojianbang yang memiliki kemampuan merumuskan dan menyusun kurikulum dan bahan pengajaran.	√		
Responsif					
11.	L1R1	Inisiatif meminta rencana kebutuhan di awal TA kepada seluruh jajaran di bawah Lemdiklat Polri			√
12.	L1R2	Kecepatan merespons kekurangan anggaran yang dialami oleh Satdik pada tahun berjalan			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
13.	L1R3	SOP atau Pilun inisiatif dari Lemdiklat Polri sesuai dengan kebutuhan masing-masing jajaran	√		
14.	L1R4	Pelibatan masing-masing Pusdik di wilayah dalam merespon situasi dan kondisi politik lokal		√	
15.	L1R5	Respons Jianbang terhadap kasus-kasus peserta didik (serdik) yang terjadi di Satdik			√
16.	L11R6	Upaya untuk standardisasi hasil (<i>output</i>) pendidikan dan pelatihan di Lemdiklat Polri			√
17.	L1R7	MoU Kerjasama dengan institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan kinerja dan kualitas pendidikan di Lemdiklat Polri	√		
18.	L1R8	Program-program peningkatan kompetensi Gadik		√	
19.	L1R9	Perubahan kurikulum untuk merespon perkembangan situasi, perkembangan ilmu, usulan Satdik, dan arahan pimpinan		√	
20.	L1R10	Kecepatan pelaksanaan tugas pelayanan SDM-ABK			√
21.	L1R11	Ketaatan dalam melakukan monitoring dan input data SIMAK BMN			√
22.	L1R12	Ketepatan waktu dalam pelaporan program RBP			√
23.	L1R13	Kecepatan membuat kajian untuk merespon kejadian atau situasi dan kondisi bangsa.			√
24.	L1R14	Kecepatan distribusi Hanjar			√
25.	L1R15	Koordinasi Satdik dengan Satker untuk penyesuaian kebutuhan materi ajar		√	
26.	L1R16	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	√		
Keadilan					
27.	L1F1	Perlakuan yang sama dalam usulan pembinaan karier			√
28.	L1F2	Pembinaan dan pengembangan Gadik dan Gadikan dilakukan secara adil			√
Perilaku					
29.	L1P1	Jumlah personel/pengajar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana.	√		
30.	L1P2	Pengalokasian anggaran Satdik bebas dari KKN			√
31.	L1P3	Pelayanan SDM bebas dari praktik KKN			√
32.	L1P4	Pengelolaan logistik bebas KKN			√
33.	L1P5	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Transparansi					
34.	L1T1	Transparansi Anggaran Lemdiklat		√	
35.	L1T2	Keterbukaan informasi kriteria dan Persyaratan untuk pembinaan karir (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan)		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
36.	L1T3	Kemudahan mengakses laporan Akuntabilitas (LKIP)		√	
37.	L1T4	Kemudahan mengakses laporan Anev		√	
38.	L1T5	Kemudahan mengakses informasi diklat		√	
39.	L1T6	Kemudahan mengakses kurikulum		√	
Efektivitas					
40.	L1E1	Realisasi penyerapan anggaran	√		
41.	L1E2	Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan/Kebutuhan Jaman		√	
42.	L1E3	Hasil kajian dari Jianbang – PSN setiap tahun sebagai bahan untuk perubahan kurikulum.		√	
43.	L1E4	Laporan Anev penerapan kurikulum dan Hanjar sebagai dasar revisi kurikulum		√	
44.	L1E5	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
Akuntabilitas					
45.	L1A1	Dibuatnya laporan AKIP setiap tahun		√	
46.	L1A2	Laporan tahunan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri		√	
47.	L1A3	Adanya laporan kegiatan penyusunan kurikulum dan revisi kurikulum serta Hanjar		√	
48.	L1A4	Laporan Monev penerapan kurikulum dan Hanjar		√	
49.	L1A5	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester	√		
AKPOL					
Kompetensi					
1.	L2K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi berbanding personel riil Akpol Lemdiklat Polri	√		
2.	L2K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sistem manajemen teknologi informasi mengenai kurikulum	√		
3.	L2K3	Kualifikasi tenaga pendidik (Gadik) di lingkungan Akpol Lemdiklat Polri	√		
4.	L2K4	Dukungan MTI sistem informasi pengajaran		√	
5.	L2K5	Jumlah personel yang memiliki kemampuan merumuskan dan menyusun kurikulum dan bahan pengajaran	√		
6.	L2K6	Pola pengasuhan/Pengawasan siswa menggunakan melalui CCTV		√	
7.	L2K7	Standar fasilitas pengajar dan belajar (Sarana dan Prasarana)		√	
8.	L2K8	Mekanisme evaluasi (Gadig, Patun, Fasilitasi, Sismet)		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
9.	L2K9	Adanya tracker alumni - Ikatan Alumni (sarana untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum, sarana dan parasana)		√	
10.	L2K10	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Lembaga Pendidik Akpol yang bersumber dari Mabes Polri	√		
11.	L2K11	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum berbanding personel Pengajar Akpol Lemdiklat Polri	√		
12.	L2K12	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan conseling berbanding personel Akpol Lemdiklat Polri	√		
13.	L213	Jumlah Personel Unsur Pelaksana yang telah mengikuti Dikspes/Dikbang/Dikjur	√		
14.	L2K14	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan kepustakaan.	√		
15.	L2K15	Rasio jumlah pengajar dan peserta didik (taruna) Akpol Lemdiklat Polri	√		
16.	L2K16	Rasio jumlah pengasuh dan peserta didik (taruna) Akpol Lemdiklat Polri	√		
Responsif					
17.	L2R1	Tingkat inisiatif Lembaga pendidik/pengajar Akpol menyelesaikan masalah/pengaduan			√
18.	L2R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Lemdik Akpol	√		
19.	L2R3	Responsifitas dan Kesiapan pelaksanaan proses mengajar belajar			√
20.	L2R4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) pengajar/pendidik Akpol Lemdiklat Polri per semester		√	
21.	L2R5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/lembaga pendidikan swasta swasta/dan sejenisnya)	√		
22.	L2R6	Respons terhadap perkembangan kebutuhan perubahan kurikulum pendidikan Akpol			√
23.	L2R7	Respons kekurangan anggaran (Pengadaan perimaan siswa baru melebihi kuota)	√		
24.	L2R8	Program peningkatan kompetensi Gadik	√		
25.	L2R9	Koordinasi Akpol dengan Lemdiklat untuk penyesuaian kebutuhan materi ajar	√		
26.	L2R10	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	√		
27.	L2R11	Respon Akpol terhadap kegiatan bullying/kekerasan di lingkungan Akpol			√
28.	L2R12	Respon terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Akpol			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
Perilaku					
29.	L2P1	Jumlah personel/pengajar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√		
30.	L2P2	Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa	√		
31.	L2P3	Kerawanan permintaan uang pelicin saat siswa dalam pola pengasuhan di dalam lingkungan pendidikan Akpol			√
32.	L2P4	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota Akpol Lemdiklat Polri ketika mengurus pendidikan/pengembangan karier			√
33.	L2P5	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Keadilan (Fairness)					
34.	L2T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Akpol Lemdiklat Polri		√	
35.	L2T2	Tingkat keterbukaan informasi wadah pengaduan orang peserta didik		√	√
36.	L2T3	Akses orang tua terhadap proses pendidik dan pengasuhan taruna		√	√
37.	L2T4	Keterbukaan promosi kenaikan jabatan dan mengikuti pendidikan		√	
38.	L2T5	Keterbukaan informasi kriteria dan Persyaratan untuk pembinaan karier (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan)	√		
39.	L2T6	Kemudahan mengakses kajian yang dihasilkan oleh Akpol	√		
40.	L2T7	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan Quick Wins)	√		
Keadilan (Fairness)					
41.	L2F1	Keadilan dalam memberikan pengasuhan kepada taruna di lingkungan lembaga pendidikan Akpol Lemdiklat Polri			√
Efektivitas					
42.	L2E1	Tingkat serapan anggaran Lembaga pendidikan Akpol Lemdiklat Polri	√		
43.	L2E2	Efektivitas integrasi dengan TNI (anggaran, pendidikan, pengasuhan)	√		
44.	L2E3	Kesesuaian perencanaan pengajaran dengan realiasi (perubahan jadwal)	√		
45.	L2E4	Rasio jumlah pengasuh terhadap jumlah taruna	√		
46.	L2E5	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
47.	L2E6	Tingkat penyelesaian pengaduan Serdik dan orang tua dan keluarga dan masyarakat	√		
Akuntabilitas					
48.	L2A1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan Penyalurannya		√	
49.	L2A2	Sarana dan Prasarana yang terinventaris dengan baik (Hibah alumni)		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
50.	L2A3	Anev Pendidikan (kurikulum, siswa, pengajar)		√	
51.	L2A4	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
52.	L2A5	Inventarisasi sarana dan prasarana hibah/sumbangan dari Alumni/Pihak lain (Ortu)	√		
53.	L2A6	Laporan Anev Tahun 2017	√		
54.	L2A7	Laporan Anev penerapan kurikulum dan Hanjar Tahun 2017	√		
55.	L2A8	Anev Serdik 2017	√		
56.	L2A9	Anev Pengajar 2017	√		
57.	L2A10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	√		
58.	L2A11	Laporan Sistem informasi personel Polri (SIPP) per semester dan Sasaran kerja pegawai PNS (SKP) per tahun	√		
STIK					
Kompetensi					
1.	L3K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi berbanding personel riil STIK Lemdiklat Polri	√		
2.	L3K2	Jumlah Personel Unsur Pelaksana yang telah mengikuti Dikspes/Dikbang/ Dikjur	√		
3.	L3K3	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajemen SDM terhadap jumlah personel STIK Lemdiklat Polri	√		
4.	L3K4	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sistem manajemen teknologi informasi mengenai kurikulum	√		
5.	L3K5	Kualifikasi tenaga pendidik (Gadik) di lingkungan STIK Lemdiklat Polri	√		
6.	L3K6	Dukungan manajemen informasi dan teknologi sistem informasi pengajaran		√	
7.	L3K7	Respons kekurangan anggaran (Pengadaan perimaan siswa baru melebihi kuota).		√	
8.	L3K8	Pola pengasuhan/Pengawasan siswa menggunakan melalui CCTV		√	
9.	L3K9	Standar fasilitas pengajar dan belajar (Sarana dan Prasarana)		√	
10.	L3K10	Mekanisme evaluasi (Gadik, Patun, Fasilitasi, Sismet)		√	
11.	L3K11	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) STIK yang bersumber dari Mabes Polri	√		
12.	L3K12	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan nasehat hukum berbanding personel Pengajar STIK Lemdiklat Polri	√		
13.	L3K13	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan conseling berbanding personel STIK Lemdiklat Polri	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
14.	L3K14	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajemen SDM terhadap jumlah personel STIK	√		
15.	L3K15	Jumlah personel yang memiliki kompetensi (sertifikasi) pengadaan barang	√		
16.	L3K16	Jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan logistik	√		
17.	L3K17	Jumlah personel yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan profesi	√		
18.	L3K18	Jumlah personel unsur pelaksana yang mengikuti Dikbangspes (terhadap keseluruhan personel)	√		
19.	L3K19	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan kepustakaan.	√		
20.	L3K20	Dukungan Teknologi Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi pendidikan	√		
Responsif					
21.	L3R1	Tingkat inisiatif lembaga pendidik/ pengajar STIK menyelesaikan masalah/ pengaduan			√
22.	L3R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki STIK Lemdiklat Polri	√		
23.	L3R3	Responsivitas dan kesiapan pelaksanaan proses mengajar belajar			√
24.	L3R4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) pengajar/ pendidik STIK Lemdiklat Polri per semester		√	
25.	L3R5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/ lembaga pendidikan swasta swasta/ dan sejenisnya)	√		
26.	L3R6	Respons terhadap perkembangan kebutuhan perubahan kurikulum pendidikan maupun terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan STIK Lemdiklat Polri			√
27.	L3R7	Program peningkatan kompetensi Gadik	√		
28.	L3R8	Koordinasi STIK dengan Lemdiklat untuk penyesuaian kebutuhan materi ajar	√		
29.	L3R9	Keberadaan <i>tracker</i> alumni-Ikatan Alumni (sarana untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum, sarana dan parasanya)	√		
Perilaku					
30.	L3P1	Jumlah personel/ pengajar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√		
31.	L3P2	Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa	√		
32.	L3P3	Kerawanan permintaan uang pelicin saat siswa dalam pola pengasuhan di dalam lingkungan pendidikan STIK Lemdiklat Polri			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
33.	L3P4	Intensitas pemberian hadiah bagi pejabat STIK Lemdiklat Polri ketika mengurus pendidikan/pengembangan karier			√
34.	L3P5	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Transparansi					
35.	L3T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Lemdik STIK Lemdiklat Polri		√	
36.	L3T2	Keterbukaan promosi kenaikan jabatan dan mengikuti pendidikan		√	
37.	L3T3	Keterbukaan informasi kriteria dan persyaratan untuk pembinaan karier (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan)	√		
38.	L3T4	Kemudahan mengakses kajian yang dihasilkan oleh STIK Lemdiklat Polri	√		
39.	L3T5	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Quick Wins)	√		
Keadilan (Fairness)					
40.	L3F1	Keadilan dalam memberikan pengasuhan kepada taruna dilingkungan lembaga pendidikan STIK Lemdiklat Polri			√
Efektivitas					
41.	L3E1	Tingkat serapan anggaran Lembaga pendidikan STIK Lemdiklat Polri	√		
42.	L3E2	Efektivitas integrasi dengan TNI (anggaran, pendidikan, pengasuhan)	√		
43.	L3E3	Kesesuaian perencanaan pengajaran dengan realiasi (perubahan jadwal)	√		
44.	L3E4	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
45.	L3E5	Tingkat penyelesaian pengaduan Serdik dan orang tua dan keluarga dan masyarakat	√		
46.	L3E6	Rasio jumlah pengajar dan peserta didik STIK Lemdiklat Polri	√		
47.	L3E7	Rasio jumlah pengasuh dan peserta didik STIK Lemdiklat Polri	√		
Akuntabilitas					
48.	L3A1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan penyalurannya		√	
49.	L3A2	Sarana dan prasarana yang terinventaris dengan baik (Hibah alumni)		√	
50.	L3A3	Anev Pendidikan (kurikulum, siswa, pengajar)		√	
51.	L3A4	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
52.	L3A5	Inventarisasi sarana dan prasarana hibah/sumbangan dari Alumni/Pihak lain (Ortu)	√		
53.	L3A6	Laporan Anev Tahun 2017	√		
54.	L3A7	Laporan Anev penerapan kurikulum dan Hanjar Tahun 2017	√		
55.	L3A8	Anev Serdik 2017	√		
56.	L3A9	Anev Pengajar 2017	√		
57.	L3A10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
58.	L3A11	Laporan Sistem informasi personel Polri (SIPP) per smester dan Sasaran kerja pegawai PNS (SKP) per tahun	√		
59.	L3A12	Laporan kegiatan penyusunan kurikulum dan revisi kurikulum serta Hanjar	√		
SESPIMMEN					
Kompetensi					
1.	L4K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi berbanding personel riil Sespim Lemdiklat Polri	√		
2.	L4K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sistem manajemen teknologi informasi mengenai kurikulum, hasil perolehan nilai siswa, Pola pengasuhan/pengawasan siswa menggunakan melalui CCTV, dukungan MTI sistem informasi pengajaran	√		
3.	L4K3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Lembaga Pendidik Sespim yang bersumber dari Mabes Polri	√		
4.	L4K4	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum berbanding personel Pengajar Sespim Lemdiklat Polri	√		
5.	L4K5	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajemen SDM terhadap jumlah personel Bagrenmin Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri	√		
6.	L4K6	Jumlah personel yang memiliki kompetensi (sertifikasi) pengadaan barang	√		
7.	L4K7	Jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan logistik	√		
8.	L4K8	Jumlah personel yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan profesi	√		
9.	L4K9	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan kepustakaan	√		
10.	L4K10	Dukungan Teknologi Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi Pendidikan	√		
11.	L4K11	Jumlah personel yang memiliki kemampuan merumuskan dan menyusun kurikulum dan bahan pengajaran	√		
12.	L4K12	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) Satdik	√		
Responsif					
13.	L4R1	Tingkat inisiatif Lembaga pendidik/ pengajar Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri menyelesaikan masalah/ pengaduan			√
14.	L4R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri	√		
15.	L4R3	Responsivitas dan kesiapan pelaksanaan proses mengajar belajar			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
16.	L4R4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) pengajar/pendidik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri		√	
17.	L4R5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/lembaga pendidikan swasta dan sejenisnya)	√		
18.	L4R6	Inisiatif terkait dengan isu pendidikan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan			√
19.	L4R7	Program peningkatan kompetensi Gadik	√		
20.	L4R8	Koordinasi Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri dengan Lemdiklat untuk penyesuaian kebutuhan materi ajar	√		
21.	L4R9	Keberadaan <i>tracker</i> alumni-Ikatan Alumni (sarana untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum, sarana dan parasana)	√		
22.	L4R10	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	√		
23.	L4R11	Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan/kebutuhan zaman		√	√
Perilaku					
24.	L4P1	Jumlah personel/pengajar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√		
25.	L4P2	Sidang disiplin, sidang Wanjak Korbintasis (siswa)	√		
26.	L4P3	Rasio jumlah pelanggaran kode etik, disiplin, pidana yang dilakukan oleh siswa terhadap total jumlah siswa	√		
27.	L4P4	Kerawanan permintaan uang pelicin saat siswa dalam pola pengasuhan di dalam lingkungan pendidikan Sespim Lemdiklat Polri			√
28.	L4P5	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota Sespim Lemdiklat Polri ketika mengurus pendidikan/pengembangan karier			√
29.	L4P6	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Transparansi					
30.	L4T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Sespim Lemdiklat Polri		√	
31.	L4T2	Keterbukaan prosedur dan informasi kenaikan jabatan maupun mengikuti pendidikan		√	
32.	L4T3	Akses siswa Perwira terhadap proses pendidikan	√		
33.	L4T4	Keterbukaan informasi kriteria dan Persyaratan untuk pembinaan karier (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan)	√		
34.	L4T5	Kemudahan mengakses kurikulum	√		
35.	L4T6	Kemudahan mengakses kajian yang dihasilkan oleh Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri	√		
36.	L4T7	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Quick Wins)	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
Keadilan (Fairness)					
37.	L4F1	Keadilan pada Pembinaan karier (promosi) pendidikan dan jabatan kenaikan pangkat (mengusulkan).			√
Efektivitas					
38.	L4E1	Tingkat serapan anggaran Lembaga pendidikan Sespim Lemdiklat Polri	√		
39.	L4E2	Kesesuaian perencanaan pengajaran dengan realiasi (perubahan jadwal)	√		
40.	L4E3	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
41.	L4E4	Tingkat penyelesaian pengaduan Siswa Perwira	√		
42.	L4E5	Rasio jumlah pengajar dan peserta Siswa Perwira Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri	√		
Akuntabilitas					
43.	L4A1	Sarana dan Prasarana yang terinventaris dengan baik (Hibah alumni)		√	
44.	L4A2	Anev Pendidikan (kurikulum, siswa, pengajar)		√	
45.	L4A3	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
46.	L4A4	Inventarisasi sarana dan prasarana hibah/sumbangan dari Alumni/Pihak lain (Ortu)	√		
47.	L4A5	Laporan Anev Tahun 2017	√		
48.	L4A6	Laporan Anev penerapan kurikulum dan hanjar Tahun 2017	√		
49.	L4A7	Anev Siswa Perwira 2017	√		
50.	L4A8	Anev Pengajar 2017	√		
51.	L4A9	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	√		
52.	L4A10	Laporan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per semester	√		
53.	L4A11	Laporan kegiatan penyusunan kurikulum dan revisi kurikulum serta Hanjar	√		
DIKLAT RESERSE					
Kompetensi					
1.	L5K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi berbanding personel riil Lemdik Diklat Reserse Lemdiklat Polri	√		
2.	L5K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sistem manajemen teknologi informasi mengenai kurikulum	√		
3.	L5K3	Kualifikasi tenaga pendidik (Gadik) di lingkungan Diklat Reserse Lemdiklat Polri	√		
4.	L5K4	Dukungan MTI sistem informasi pengajaran		√	
5.	L5K5	Jumlah Personel yang telah mengikuti Dikbang/Dikjur			
6.	L5K6	Respons kekurangan anggaran (Pengadaan perimaan siswa baru melebihi kuota)		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
7.	L5K7	Pola pengasuhan/Pengawasan siswa menggunakan melalui CCTV		√	
8.	L5K8	Standar fasilitas pengajar dan belajar (Sarana dan Prasarana)		√	
9.	L5K9	Mekanisme evaluasi (Gadik, Patun, Fasilitasi, Sismet).		√	
10.	L5K10	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajemen SDM terhadap jumlah personel Diklat Reserse Lemdiklat Polri		√	
11.	L5K11	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Lembaga Pendidik Diklat Reserse Lemdiklat Polri yang bersumber dari Mabes Polri	√		
12.	L5K12	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum berbanding personel Pengajar Diklat Reserse Lemdiklat Polri	√		
13.	L5K13	Jumlah personel yang memiliki kompetensi (sertifikasi) pengadaan barang	√		
14.	L5K14	Jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan logistik	√		
15.	L5K15	Jumlah personel yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan profesi	√		
16.	L5K16	Jumlah personel pelaksana yang mengikuti Dikbangspes (terhadap keseluruhan personel)	√		
17.	L5K17	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program	√		
18.	L5K18	Jumlah personel unsur pelaksana yang mengikuti Dikbangspes (terhadap keseluruhan personel)	√		
19.	L5K19	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan kepustakaan	√		
20.	L5K20	Dukungan Teknologi Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi Pendidikan	√		
21.	L5K21	Jumlah personel yang memiliki kemampuan merumuskan dan menyusun kurikulum dan bahan pengajaran.	√		
22.	L5K22	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan konseling berbanding personel Diklat Reserse Lemdiklat Polri	√		
Responsif					
23.	L5R1	Tingkat inisiatif lembaga pendidik/pengajar Diklat Reserse Lemdiklat Polri menyelesaikan masalah/pengaduan			√
24.	L5R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Diklat Reserse Lemdiklat Polri	√		
25.	L5R3	Responsivitas dan kesiapan pelaksanaan proses mengajar belajar			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
26.	L5R4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) pengajar/pendidik Diklat Reserse Lemdiklat Polri per semester		√	
27.	L5R5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/lembaga pendidikan swasta swasta/dan sejenisnya)	√		
28.	L5R6	Respons terhadap perkembangan kebutuhan perubahan kurikulum pendidikan maupun terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Diklat Reserse Lemdiklat Polri			√
29.	L5R7	Adanya <i>tracker alumni</i> -Ikatan Alumni (sarana untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum, sarana dan parasana)	√		
30.	L5R8	Program peningkatan kompetensi Gadik	√		
31.	L5R9	Koordinasi Dikserse dengan Lemdiklat untuk penyesuaian kebutuhan materi ajar	√		
32.	L5R10	Implementasi sistem penilaian kinerja personel (<i>performance evaluation</i>) per semester	√		
Perilaku					
33.	L5P1	Jumlah personel/pengajar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√		
34.	L5P2	Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa	√		
35.	L5P3	Kerawanan permintaan uang pelicin saat siswa dalam pola pengasuhan di dalam lingkungan pendidikan Diklat Reserse Lemdiklat Polri			√
36.	L5P4	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota Lemdik Diklat Reserse ketika mengurus pendidikan/pengembangan karier			√
37.	L5P5	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Transparansi					
38.	L5T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Lemdik Diklat Reserse Lemdiklat Polri		√	
39.	L5T2	Tingkat keterbukaan informasi wadah pengaduan orang tua murid		√	
40.	L5T3	Akses orang tua terhadap proses pendidik dan pengasuhan taruna		√	
41.	L5T4	Keterbukaan promosi kenaikan jabatan dan mengikuti pendidikan		√	
42.	L5T5	Keterbukaan informasi kriteria dan Persyaratan untuk pembinaan karier (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan)	√		
43.	L5T6	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Quick Wins)	√		
Keadilan (Fairness)					
44.	L5F1	Keadilan dalam memberikan pengasuhan kepada taruna di lingkungan lembaga pendidikan Diklat Reserse Lemdiklat Polri			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
Efektivitas					
45.	L5E1	Tingkat serapan anggaran Lembaga pendidikan Diklat Reserse Lemdiklat Polri	√		
46.	L5E2	Efektivitas integrasi dengan TNI (anggaran, pendidikan, pengasuhan)	√		
47.	L5E3	Kesesuaian perencanaan pengajaran dengan realiasi (perubahan jadwal)	√		
48.	L5E4	Rasio jumlah pengasuh terhadap jumlah taruna	√		
49.	L5E5	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
50.	L5E6	Jumlah PNBP anggaran beserta Realisasi/Serapan Tahun Anggaran 2017	√		
51.	L5E7	Rasio jumlah pengajar dan peserta didik	√		
52.	L5E8	Rasio jumlah pengasuh dan peserta didik	√		
Akuntabilitas					
53.	L5A1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan penyalurannya		√	
54.	L5A2	Sarana dan prasarana yang terinventaris dengan baik (hibah alumni)		√	
55.	L5A3	Anev Pendidikan (kurikulum, siswa, pengajar)		√	
56.	L5A4	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN.	√		
57.	L5A5	Inventarisasi sarana dan prasarana hibah/sumbangan dari Alumni/Pihak lain (Ortu)	√		
58.	L5A6	Laporan Anev Tahun 2017	√		
59.	L5A7	Laporan Anev penerapan kurikulum dan Hanjar Tahun 2017	√		
60.	L5A8	Anev Serdik 2017	√		
61.	L5A9	Anev Pengajar 2017	√		
62.	L5A10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	√		
63.	L5A11	Laporan Sistem informasi personel Polri (SIPP) per smester dan Sasaran kerja Pegawai (SKP) PNS per tahun	√		
64.	L5A12	Laporan kegiatan penyusunan kurikulum dan revisi kurikulum serta Hanjar	√		
PUSDIKLANTAS					
Kompetensi					
1.	L6K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi berbanding personel riil Pusdiklantas Lemdiklat Polri	√		
2.	L6K2	Jumlah Personel Unsur Pelaksana yang telah mengikuti Dikspes/Dikbang/Dikbangspes	√		
3.	L6K3	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sistem manajemen teknologi informasi mengenai kurikulum	√		
4.	L6K4	Kualifikasi tenaga pendidik (Gadik) di lingkungan Pusdiklantas Lemdiklat Polri	√		
5.	L6K5	Dukungan MTI sistem informasi pengajaran		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
6.	L6K6	Respons kekurangan anggaran (Pengadaan perimaan siswa baru melebihi kuota)		√	
7.	L6K7	Pola pengasuhan/Pengawasan siswa menggunakan melalui CCTV		√	
8.	L6K8	Standar fasilitas pengajar dan belajar (sarana dan prasarana)		√	
9.	L6K9	Mekanisme evaluasi (Gadik, Patun, Fasilitasi, Sismet)		√	
10.	L6K10	Adanya <i>tracker</i> alumni-Ikatan Alumni (sarana untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum, sarana dan parasana)		√	
11.	L6K11	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Lembaga Pendidik Pusdiklantas yang bersumber dari Mabes Polri	√		
12.	L6K12	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum berbanding personel Pengajar Pusdiklantas	√		
13.	L6K13	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajemen SDM terhadap jumlah personel Pusdiklantas	√		
14.	L6K14	Jumlah personel yang memiliki kompetensi (sertifikasi) pengadaan barang	√		
15.	L6K15	Jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan logistik	√		
16.	L6K16	Jumlah personel yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan profesi	√		
17.	L6K17	Jumlah personel urusur Pelaksana yang mengikuti Dikbangspes (terhadap keseluruhan personel)	√		
18.	L6K18	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan kepustakaan.	√		
19.	L6K19	Dukungan Teknologi Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi Pendidikan	√		
20.	L6K20	Jumlah personel yang memiliki kemampuan merumuskan dan menyusun kurikulum dan bahan pengajaran.	√		
21.	L6K21	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan konseling berbanding personel Pusdiklantas Lemdiklat Polri	√		
Responsif					
22.	L6R1	Tingkat inisiatif lembaga pendidik/ pengajar Pusdiklantas menyelesaikan masalah/pengaduan			√
23.	L6R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Pusdiklantas Lemdiklat Polri	√		
24.	L6R3	Responsivitas dan Kesiapan pelaksanaan proses mengajar belajar			√

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
25.	L6R4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) pengajar/pendidik Pusdiklantas Lemdiklat Polri per semester		√	
26.	L6R5	Jumlah MoU kemitraan dengan pihak luar (universitas/lembaga pendidikan swasta swasta/dan sejenisnya)	√		
27.	L6R6	Respons terhadap perkembangan kebutuhan perubahan kurikulum pendidikan maupun terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Pusdiklantas Lemdiklat Polri			√
28.	L6R7	Program peningkatan kompetensi Gadik	√		
29.	L6R8	Koordinasi Pusdiklantas dengan Lemdiklat untuk penyesuaian kebutuhan materi ajar	√		
Perilaku					
30.	L6P1	Jumlah personel/pengajar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana.	√		
31.	L6P2	Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa	√		
32.	L6P3	Kerawanan permintaan uang pelicin saat siswa dalam pola pengasuhan di dalam lingkungan pendidikan Pusdiklantas Lemdiklat Polri			√
33.	L6P4	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota Pusdiklantas ketika mengurus pendidikan/pengembangan karier			√
Transparansi					
34.	L6T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Pusdik Lantas Lemdiklat Polri		√	
35.	L6T2	Tingkat keterbukaan informasi wadah pengaduan orang tua murid		√	
36.	L6T3	Akses orang tua terhadap proses pendidikan dan pengasuhan taruna		√	
37.	L6T4	Keterbukaan promosi kenaikan jabatan dan mengikuti pendidikan		√	
38.	L6T5	Keterbukaan informasi kriteria dan Persyaratan untuk pembinaan karier (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan)	√		
39.	L6T6	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Quick Wins)	√		
Keadilan (Fairness)					
40.	L6F1	Keadilan dalam memberikan pengasuhan kepada taruna di lingkungan lembaga pendidikan Pusdiklantas Lemdiklat Polri			√
Efektivitas					
41.	L6E1	Tingkat serapan anggaran Pusdiklantas Lemdiklat Polri	√		
42.	L6E2	Efektivitas integrasi dengan TNI (Anggaran, pendidikan, pengasuhan)	√		
43.	L6E3	Kesesuaian perencanaan pengajaran dengan realiasi (perubahan jadwal)	√		
44.	L6E4	Rasio jumlah pengasuh terhadap jumlah taruna	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
45.	L6E5	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
46.	L6E6	Jumlah PNBP anggaran beserta realisasi/serapan Tahun Anggaran 2017	√		
47.	L6E7	Rasio jumlah pengajar dan peserta didik	√		
48.	L6E8	Rasio jumlah pengasuh dan peserta didik	√		
Akuntabilitas					
49.	L6A1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan Penyalurannya		√	
50.	L6A2	Sarana dan prasarana yang terinventaris dengan baik (Hibah alumni)		√	
51.	L6A3	Anev Pendidikan (kurikulum, siswa, pengajar)		√	
52.	L6A4	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
53.	L6A5	Inventarisasi sarana dan prasarana hibah/sumbangan dari Alumni/Pihak lain	√		
54.	L6A6	Laporan Anev Tahun 2017	√		
55.	L6A7	Laporan Anev penerapan kurikulum dan hanjar Tahun 2017	√		
56.	L6A8	Anev Serdik 2017	√		
57.	L6A9	Anev Pengajar 2017	√		
58.	L6A10	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)	√		
59.	L6A11	Laporan Sistem informasi personel Polri (SIPP) per smester dan Sasaran kerja pegawai (SKP) PNS per tahun	√		
60.	L6A12	Laporan kegiatan penyusunan kurikulum dan revisi kurikulum serta hanjar	√		
PUSDIKBINMAS					
Kompetensi					
1.	L7K1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi berbanding personel riil Pusdikbinmas Lemdiklat Polri	√		
2.	L7K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi sistem manajemen teknologi informasi mengenai kurikulum	√		
3.	L7K3	Jumlah personel unsur pelaksana yang telah mengikuti Dikspes/Dikbang/Dikbangspes	√		
4.	L7K4	Kualifikasi tenaga pendidik (Gadik) di lingkungan Pusdikbinmas Lemdiklat Polri	√		
5.	L7K5	Dukungan MTI sistem informasi pengajaran		√	
6.	L7K6	Respons kekurangan anggaran (pengadaan perimaan siswa baru melebihi kuota).		√	
7.	L7K7	Pola pengasuhan/Pengawasan siswa menggunakan melalui CCTV		√	
8.	L7K8	Standar fasilitas pengajar dan belajar (sarana dan prasarana)		√	
9.	L7K9	Mekanisme evaluasi (Gadik, Patun, Fasilitasi, Sismet)		√	

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
10.	L7K10	Adanya <i>tracker</i> alumni-Ikatan Alumni (sarana untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum, sarana dan parasana)		√	
11.	L7K11	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Lembaga Pendidik Pusdikbinmas yang bersumber dari Mabes Polri	√		
12.	L7K12	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum berbanding personel pengajar Pusdikbinmas Lemdiklat Polri	√		
13.	L7K13	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi bidang manajemen SDM terhadap jumlah personel Pusdikbinmas Lemdiklat Polri	√		
14.	L7K14	Jumlah personel yang memiliki kompetensi (sertifikasi) pengadaan barang	√		
15.	L7K15	Jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan logistik	√		
16.	L7K16	Jumlah personel yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan profesi	√		
17.	L7K17	Jumlah personel unsur Pelaksana yang mengikuti Dikbangspes (terhadap keseluruhan personel)	√		
18.	L7K18	Jumlah personel yang memiliki kompetensi pengkajian, evaluasi dan validitas program pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan kepastakaan.	√		
19.	L7K19	Dukungan Teknologi Informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi pendidikan	√		
20.	L7K20	Jumlah personel yang memiliki kemampuan merumuskan dan menyusun kurikulum dan bahan pengajaran.	√		
21.	L7K21	Rasio personel yang bertugas untuk memberikan konseling berbanding personel Pusdik Binmas Lemdiklat Polri	√		
Responsif					
22.	L7R1	Tingkat inisiatif Lembaga pendidik/ pengajar Pusdikbinmas Lemdiklat Polri menyelesaikan masalah/pengaduan			√
23.	L7R2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Pusdik Binmas Lemdiklat Polri	√		
24.	L7R3	Responsivitas dan Kesiapan pelaksanaan proses mengajar belajar			√
25.	L7R4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) pengajar/pendidik Pusdik Binmas Lemdiklat Polri per semester		√	
26.	L7R5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/lembaga pendidikan swasta swasta/dan sejenisnya)	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
27.	L7R6	Respons terhadap perkembangan kebutuhan perubahan kurikulum pendidikan maupun terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Pusdikbinmas Lemdiklat Polri			√
28.	L7R7	Program peningkatan kompetensi Gadik	√		
29.	L7R8	Koordinasi Pusdikbinmas dengan Lemdiklat untuk penyesuaian kebutuhan materi ajar	√		
Perilaku					
30.	L7P1	Jumlah personel/pengajar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana.	√		
31.	L7P2	Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa	√		
32.	L7P3	Kerawanan permintaan uang pelicin saat siswa dalam pola pengasuhan di dalam lingkungan pendidikan Pusdikbinmas Lemdiklat Polri			√
33.	L7P4	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota Lemdik Pusdikbinmas ketika mengurus pendidikan/pengembangan karier			√
34.	L7P5	Rasio pejabat yang melaporkan LKHPN terhadap total pejabat struktural	√		
Transparansi					
35.	L7T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Pusdik Binmas Lemdiklat Polri		√	
36.	L7T2	Tingkat keterbukaan informasi wadah pengaduan orang tua murid		√	
37.	L7T3	Akses orang tua terhadap proses pendidikan dan pengasuhan taruna		√	
38.	L7T4	Keterbukaan promosi kenaikan jabatan dan mengikuti pendidikan		√	
39.	L7T5	Keterbukaan informasi kriteria dan persyaratan untuk pembinaan karier (termasuk Dikbangum, Dikbangspes, pelatihan)	√		
40.	L7T6	Kemudahan mengakses Laporan Kinerja Satker (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Quick Wins)	√		
Keadilan (Fairness)					
41.	L7F1	Keadilan dalam memberikan pengasuhan kepada taruna di lingkungan Pusdik Binmas Lemdiklat Polri			√
Efektivitas					
42.	L7E1	Tingkat serapan anggaran Lembaga pendidikan Pusdikbinmas Lemdiklat Polri	√		
43.	L7E2	Efektivitas integrasi dengan TNI (Anggaran, pendidikan, pengasuhan)	√		
44.	L7E3	Kesesuaian perencanaan pengajaran dengan realiasi (perubahan jadwal)	√		
45.	L7E4	Nilai LKIP Kementerian PANRB terhadap Polri	√		
46.	L7E5	Rasio jumlah pengasuh terhadap jumlah taruna	√		
47.	L7E6	Rasio jumlah pengajar dan peserta didik.	√		

No	Kode	Indikator	Jenis Data		
			Objektif	Observasi	Persepsi
48.	L7E7	Rasio jumlah pengasuh dan peserta didik.	√		
Akuntabilitas					
49.	L7A1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan Penyalurannya		√	
50.	L7A2	Sarana dan prasarana yang terinventaris dengan baik (hibah alumni)		√	
51.	L7A3	Kualitas anev pendidikan (kurikulum, siswa, pengajar)		√	
52.	L7A4	Implementasi sistem pelaporan SIMAK BMN	√		
53.	L7A5	Inventarisasi sarana dan prasarana hibah/sumbangan dari Alumni/Pihak lain	√		
54.	L7A6	Laporan Anev Tahun 2017	√		
55.	L7A7	Laporan Anev penerapan kurikulum dan Hanjar Tahun 2017	√		
56.	L7A8	Anev Serdik 2017	√		
57.	L7A9	Anev Pengajar 2017	√		
58.	L7A10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	√		
59.	L7A11	Laporan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) per smester dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS per tahun	√		
60.	L7A12	Laporan kegiatan penyusunan kurikulum dan revisi kurikulum serta Hanjar	√		

b. Indikator ITK tingkat Polda;

1) Daftar Indikator BINMAS

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.204
1.	B2K1	Persentase jumlah personel Binmas terhadap DSPP personel Binmas	√			0.268
2.	B1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Binmas (Dikjur Binmas) berbanding personel riil Binmas	√			0.263
3.	B1K3	Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Binmas	√			0.227
4.	B1K4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Binmas yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.242
Responsif						0.188
5.	B1R1	Tingkat inisiatif Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan Binmas			√	0.338
6.	B1R2	Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa			√	0.362
7.	B1R3	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.299
Perilaku						0.274
8.	B1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.463
9.	B1P2	Integritas sebagai anggota Bhabinkamtibmas			√	0.537
Transparansi						0.063
10.	B1T1	Tingkat keterbukaan anggaran Binmas		√		0.541

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
11.	B1T2	Tingkat keterbukaan informasi jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polda (Polda, Polres, Polsek, Subsektor)		√		0.459
Keadilan (Fairness)						0.139
12.	B1F1	Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas (kuesioner persepsi)			√	0.510
13.	B2F3	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Binmas	√			0.490
Efektivitas						0.102
14.	B1E1	Rasio Bhabinkamtibmas di wilayah Polda (Polres, Polsek, Subsektor) terhadap jumlah desa	√			0.526
15.	B1E3	Persentase serapan anggaran Binmas	√			0.474
Akuntabilitas						0.031
16.	B1A1	Nilai AKIP Binmas	√			1.000

2) Daftar Indikator LANTAS

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.196
17.	L2K1	Persentase jumlah personel Lantas terhadap DSPP personel Lantas	√			0.261
18.	L2K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Lantas (Dikmas, Yasa, Patwal, Regiden dan Laka Lantas) berbanding personel riil Lantas	√			0.248
19.	L2K3	Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Lantas	√			0.258
20.	L2K6	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Lantas yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.232
Responsif						0.210
21.	L2R1	Tingkat inisiatif Lantas untuk melaksanakan Turjawali Lantas			√	0.244

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
22.	L2R2	Kecepatan mendatangi TKP Kecelakaan			√	0.276
23.	L2R3	Kecepatan personel Lantas dalam melayani pembuatan SIM, STNK dan BPKB			√	0.260
24.	L2R4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.220
Perilaku						0.232
25.	L3P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.510
26.	L3P2	Integritas sebagai anggota Lantas			√	0.490
Transparansi						0.130
27.	L2T1	Tingkat keterbukaan anggaran Lantas		√		0.493
28.	L3T3	Tingkat keterbukaan prosedur, biaya dan waktu pembuatan SIM, STNK dan BPKB di Polda		√		0.507
Keadilan (Fairness)						0.095
29.	L2F1	Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan turjawali (kuesioner persepsi)			√	0.507
30.	L2F3	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Lantas	√			0.493
Efektivitas						0.094
31.	L2E1	Persentase serapan anggaran Lantas	√			0.151
32.	L2E2	Daftar kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda tahun 2013-2014 (penurunan/kenaikan jumlah kecelakaan)	√			0.159
33.	L2E3	Efektivitas sarana pengaduan layanan SIM, STNK dan BPKB		√		0.180
34.	L2E4	Persentase jumlah pengaduan layanan SIM, STNK dan BPKB yang dapat diselesaikan	√			0.175
35.	L2E5	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan SIM, STNK dan BPKB	√			0.174

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
36.	L2E6	Tingkat realisasi terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (SIM, STNK, BPKB)	√			0.160
Akuntabilitas						0.043
37.	L2A1	Nilai AKIP Lantas	√			1.000

3) Daftar Indikator INTELKAM

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.267
38.	I1K1	Persentase jumlah personel Intelkam terhadap DSPP personel Intelkam	√			0.258
39.	I1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Intelkam berbanding personel riil Intelkam	√			0.278
40.	I1K3	Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Intelkam	√			0.222
41.	I1K4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Intelkam yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.242
Responsif						0.198
42.	I1R1	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif	√			0.300
43.	I1R2	Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan deteksi Intelijen			√	0.345
44.	I1R3	Kecepatan personel Intelkam dalam melayani pembuatan SKCK			√	0.355
Perilaku						0.143
45.	I1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.476

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
46.	I1P2	Integritas sebagai anggota Intelkam			√	0.524
Transparansi						0.063
47.	I1T1	Tingkat keterbukaan anggaran Intelkam		√		0.5
48.	I1T2	Tingkat keterbukaan prosedur dan biaya pelayanan publik (SKCK)		√		0.5
Keadilan (Fairness)						0.031
49.	I1F1	Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan Intelkam (kuesioner persepsi)			√	0.507
50.	I1F3	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Intelkam			√	0.493
Efektivitas						0.179
51.	I1E1	Tingkat realisasi terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (SKCK)	√			0.219
52.	I1E2	Persentase serapan anggaran Intelkam	√			0.191
53.	I1E3	Efektivitas sarana pengaduan layanan SKCK		√		0.189
54.	I1E4	Persentase jumlah pengaduan layanan SKCK yang dapat diselesaikan	√			0.201
55.	I1E5	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan SKCK	√			0.200
Akuntabilitas						0.118
56.	I1A1	Nilai AKIP Intelkam	√			1.000

4) Daftar Indikator RESKRIM UMUM

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.259
57.	R3K1	Persentase jumlah personel Reskrim Umum terhadap DSPP personel Reskrim	√			0.247

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
58.	R3K2	Presentase jumlah personel Reskrim Umum yang memiliki kompetensi terhadap total DSPP	√			0.257
59.	R3K3	Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim umum	√			0.240
60.	R3K4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Reskrim Umum yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.255
Responsif						0.217
61.	R3R1	Rata-rata kecepatan penanganan perkara Reskrim Umum terhadap jangka waktu yang ditentukan			√	0.508
62.	R3R4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.492
Perilaku						0.105
63.	R3P1	Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada. Ada dokumen sidang pelanggaran kode etik (Bidpropam, Subbag renmin Reskrim Umum)	√			0.469
64.	R3P2	Integritas sebagai anggota Reskrim Umum			√	0.531
Transparansi						0.177
65.	R3T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Reskrim		√		1.000
Keadilan (Fairness)						0.141
66.	R3F1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor tingkat ekonomi			√	0.526
67.	R3F2	Rasio jumlah anggota penyidik perempuan berbanding penyidik laki-laki	√			0.474

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Efektivitas						0.067
68.	R1E1	Persentase jumlah Kasus P21 Terhadap total kasus yang ada	√			0.528
69.	R1E2	Persentase serapan anggaran Reskrim Umum	√			0.472
Akuntabilitas						0.034
70.	R3A1	Nilai AKIP Reskrim Umum	√			1.000

5) Daftar Indikator POLAIR

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.274
71.	P1K1	Persentase jumlah personel Polair terhadap DSPP personel Polair.	√			0.195
72.	P1K2	Persentase jumlah personel Polair yang memiliki kompetensi Polair (ANT, ATT, KomLek Kapal, Harwat Kapal, Dasar Polair, Idik Polair, Serse, Intel, SAR Polair dan Binmas) berbanding DSPP Polair	√			0.077
73.	P1K3	Rasio kapal Polair dibanding luas wilayah perairan operasional yang menjadi tanggung jawab Polda	√			0.202
74.	P1K4	Rasio jumlah Personel Polair terhadap jumlah pelabuhan yang ada diwilayahnya yang menjadi tanggung jawab Polda	√			0.185
75.	P1K5	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Polair yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.141
Responsif						0.164
76.	P1R1	Tingkat inisiatif Polair untuk melaksanakan SAR perairan			√	0.346

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
77.	P1R2	Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Polair untuk melakukan patroli perairan			√	0.357
78.	P1R3	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.298
Perilaku						0.127
79.	P1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.481
80.	P1P2	Integritas sebagai anggota Polair	√			0.519
Transparansi						0.154
81.	P2T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Polair		√		1.000
Keadilan (Fairness)						0.137
82.	P1F1	Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan tugas Polair (Patroli perairan/perbatasan, SAR, Sambang Nusa, Polmas perairan)			√	1.000
Efektivitas						0.078
83.	P1E1	Persentase serapan anggaran Polair	√			1.000
Akuntabilitas						0.066
84.	P1A1	Nilai AKIP Polair	√			1.000

6) Daftar Indikator RESKRIM KHUSUS

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.272
85.	R3K1	Persentase jumlah personel Reskrim Khusus terhadap DSPP personel Reskrim	√			0.243
86.	R3K2	Persentase jumlah personel Reskrim Khusus yang memiliki kompetensi berbanding jumlah personel	√			0.274

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
87.	R3K3	Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim Khusus	√			0.226
88.	R3K4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Reskrim Khusus yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.256
Responsif						0.136
89.	R3R1	Rata-rata kecepatan penanganan perkara Reskrim Khusus terhadap jangka waktu yang ditentukan			√	0.514
90.	R3R4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.486
Perilaku						0.179
91.	R3P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.476
92.	R3P2	Integritas sebagai anggota Reskrim Khusus			√	0.524
Transparansi						0.063
93.	R3T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Reskrim Khusus	√			1.000
Keadilan (Fairness)						0.219
94.	R3F1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor tingkat ekonomi			√	0.548
95.	R3F2	Rasio jumlah anggota penyidik perempuan berbanding penyidik laki-laki	√			0.452
Efektivitas						0.101
96.	R1E1	Persentase jumlah Kasus P21 Terhadap total kasus yang ada	√			0.539
97.	R1E2	Persentase serapan anggaran Reskrim Khusus	√			0.461
Akuntabilitas						0.030
98.	R3A1	Nilai AKIP Reskrim Khusus	√			1.000

7) Daftar Indikator RESKRIM NARKOBA

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.262
99.	R3K1	Persentase jumlah personel Reskrim Narkoba terhadap DSPP personel Reskrim	√			0.351
100.	R3K2	Persentase jumlah personel Reskrim Narkoba yang memiliki kompetensi berbanding DSPP	√			0.253
101.	R3K3	Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim Narkoba	√			0.148
102.	R3K4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Reskrim Narkoba yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.248
Responsif						0.140
103.	R3R1	Rata-rata kecepatan penanganan perkara Reskrim Narkoba terhadap jangka waktu yang ditentukan			√	0.539
104.	R3R4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.461
Perilaku						0.222
105.	R3P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.469
106.	R3P2	Integritas sebagai anggota Resnarkoba			√	0.531
Transparansi						0.060
107.	R3T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Resnarkoba		√		1.000
Keadilan (Fairness)						0.180
108.	R3F1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor tingkat ekonomi			√	0.543
109.	R3F2	Rasio jumlah anggota penyidik perempuan berbanding penyidik laki-laki	√			0.451

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
Efektivitas						0.105
110.	R1E1	Persentase jumlah Kasus P21 Terhadap total kasus yang ada	√			0.507
111.	R1E2	Persentase serapan anggaran Res Narkoba	√			0.493
Akuntabilitas						0.030
112.	R3A1	Nilai AKIP Res Narkoba	√			1.000

8) Daftar Indikator SABHARA

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.240
113.	S2K1	Persentase jumlah personel Sabhara terhadap DSPP personel Sabhara	√			0.256
114.	S2K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Sabhara (Dikbangpes Turjawali, Dikbangpes Tipiring, Dikbangpes Dalmas, Dikbangpes TPTKP, Dikbangpes SAR) berbanding DSPP Sabhara	√			0.259
115.	S2K3	Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Sabhara	√			0.254
116.	S2K4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Sabhara yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.230
Responsif						0.236
117.	S2R1	Tingkat inisiatif Sabhara untuk melaksanakan Turjawali			√	0.203
118.	S2R2	Kecepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)			√	0.214
119.	S2R3	Kecepatan pasukan Dalmas dalam mendatangi TKP unjuk rasa			√	0.218
120.	S2R4	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.175

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
121.	S2R5	Kecepatan personel Tipiring dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah)			√	0.189
Perilaku						0.193
122.	S2P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.510
123.	S2P2	Integritas sebagai anggota Sabhara			√	0.490
Transparansi						0.064
124.	S2T1	Tingkat Keterbukaan anggaran Sabhara		√		1.000
Keadilan (Fairness)						0.124
125.	S2F1	Diskriminasi dalam pelaksanaan turjawali			√	0.507
126.	S2F2	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Sabhara	√			0.049
Efektivitas						0.104
127.	S2E1	Persentase serapan anggaran Sabhara	√			1.000
Akuntabilitas						0.040
128.	S2E2	Nilai AKIP Sabhara	√			1.000

9) Daftar Indikator SDM

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
			Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi	
Kompetensi						0.219
129.	M1K1	Persentase jumlah personel SDM terhadap DSPP personel SDM	√			0.224
130.	M1K2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SDM (Dalpers, Bangpers, Binkar, Jianstra) berbanding DSPP SDM	√			0.256
131.	M1K3	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP SDM yang bersumber dari Mabes Polri	√			0.240

No	Kode	Indikator	Jenis Data			Bobot
132.	M1K4	Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan secara regular bagi anggota Polri yang akan menduduki suatu jabatan/pangkat tertentu melalui <i>assessment center</i>	√			0.279
Responsif						0.137
133.	M1R1	Tingkat inisiatif SDM untuk menyelesaikan masalah-masalah/pengaduan-pengaduan personalia			√	0.545
134.	M1R2	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki	√			0.455
Perilaku						0.103
135.	M1P1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana	√			0.467
136.	M1P2	Integritas sebagai anggota SDM			√	0.533
Transparansi						0.182
137.	M1T1	Tingkat Keterbukaan anggaran SDM		√		0.485
138.	M1T2	Tingkat keterlibatan pengawas eksternal dalam rekrutmen anggota Polri (Brigadir dan perwira)		√		0.515
Keadilan (Fairness)						0.259
139.	M1F1	Diskriminasi dalam proses rekrutmen/seleksi anggota Polri			√	0.533
140.	M1F2	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi SDM	√			0.467
Efektivitas						0.032
141.	M1E1	Persentase serapan anggaran SDM	√			1.000
Akuntabilitas						0.068
142.	M1A1	Nilai AKIP SDM	√			1.000

a. Indikator ITK tingkat Polres;

1) Daftar Indikator Bagsumda

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.140			
1.	MK1	Persentase jumlah personel riil Bagsumda terhadap DSP	0.195	√		
2.	MK2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Sumda berbanding personel riil Bagsumda	0.215	√		
3.	MK3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Bagsumda yang bersumber dari Mabes Polri, Polda dan Polres	0.205	√		
4.	MK4	Rasio personel Bagsumda yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum berbanding personel riil Polres	0.195	√		
5.	MK5	Jumlah personel Bagsumda yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	0.190	√		
Responsif			0.138			
6.	MR1	Tingkat inisiatif Bagsumda untuk menyelesaikan masalah/pengaduan personalia	0.208			√
7.	MR2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Sumda	0.184	√		
8.	MR3	Tersedianya daftar usulan mutasi di lingkungan Polres secara periodik 6 bulan sekali (Perkap Nomor 16 Tahun 2012)	0.211		√	
9.	MR4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) personel Polres per semester	0.226			√
10.	MR5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)	0.171	√		
Perilaku			0.152			
11.	MP1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana (tempat asal sاتفung personel melakukan pelanggaran)	0.485	√		
12.	MP2	Integritas sebagai anggota Bagsumda	0.515			√
Transparansi			0.144			
13.	MT1	Tingkat Keterbukaan anggaran Bagsumda	0.493		√	

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
14.	MT2	Tingkat keterbukaan informasi rekrutmen jabatan di polres	0.507			√
Keadilan (Fairness)			0.152			
15.	MF1	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Bagsumda	0.437	√		
16.	MF2	Keadilan dalam memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan	0.563			√
Efektivitas			0.133			
17.	ME1	Tingkat serapan anggaran Bagsumda per tahun	0.330	√		
18.	ME2	Kualitas pendampingan personel yang ditangani Bagsumda	0.339			√
19.	ME3	Prosentase paket yang dilelang secara elektronik terhadap total paket yang dilelang selama Setahun	0.331	√		
Akuntabilitas			0.141			
20.	MA1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan Penyalurannya	1.000		√	

2) Daftar Indikator Satbinmas

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.148			
21.	BK1	Persentase jumlah personel Satbinmas terhadap DSPP personel Satbinmas	0.203	√		
22.	BK2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Satbinmas (Dikbangspes Satbinmas) berbanding personil riil Satbinmas	0.232	√		
23.	BK3	Rasio jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Satbinmas	0.174	√		
24.	BK4	Rasio jumlah kendaraan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Bhabinkamtibmas	0.203	√		
25.	BK5	Kepatuhan pengarsipan Piranti Lunak (Pilun) Satbinmas yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda	0.188	√		
Responsif			0.151			
26.	BR1	Tingkat inisiatif Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan Satbinmas	0.278			√

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
27.	BR2	Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa	0.291			√
28.	BR3	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Binmas	0.231	√		
29.	BR4	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar	0.199	√		
Perilaku			0.163			
30.	BP1	Jumlah personel Satbinmas yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.500	√		
31.	BP2	Integritas sebagai anggota Bhabinkamtibmas	0.500			√
Transparansi			0.132			
32.	BT1	Tingkat keterbukaan anggaran Satbinmas	0.507		√	
33.	BT2	Tingkat keterbukaan informasi jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polres	0.493		√	
Keadilan (Fairness)			0.129			
34.	BF1	Keadilan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas	0.539			√
35.	BF2	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Satbinmas	0.461	√		
Efektivitas			0.138			
36.	BE1	Rasio Bhabinkamtibmas definitif di wilayah Polres (Polsek, Subsektor) terhadap jumlah desa	0.256	√		
37.	BE2	Efektivitas keberadaan FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat)	0.248			√
38.	BE3	Persentase serapan anggaran Satbinmas (versi tahunan per tiga bulan)	0.230	√		
39.	BE4	Bantuan personil bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat Perkap Nomor 37 Tahun 2008	0.266			√
Akuntabilitas			0.139			
40.	BA1	Kualitas laporan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas	1.000		√	

3) Daftar Indikator Satintelkam

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.149			
41.	IK1	Persentase jumlah personel Satintelkam terhadap DSPP personel Satintelkam	0.258	√		
42.	IK2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Sat Intelkam berbanding personel riil Satintelkam	0.265	√		
43.	IK3	Rasio jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan personel Satintelkam	0.225	√		
44.	IK4	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Satintelkam yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki dari Mabes Polri dan Polda	0.252	√		
Responsif			0.150			
45.	IR1	Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan deteksi Intelijen	0.189			√
46.	IR2	Kecepatan personel Intelkam dalam melayani pembuatan SKCK	0.177			√
47.	IR3	Kecepatan membuat laporan informasi (LI)	0.165			√
48.	IR4	Peta kerawanan yang dibuat dibandingkan dengan jumlah gangguan Kamtibmas yang ada	0.179		√	
49.	IR5	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	0.159	√		
50.	IR6	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar	0.131	√		
Perilaku			0.148			
51.	IP1	Jumlah personel Satintelkam yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.469	√		
52.	IP2	Integritas sebagai anggota Satintelkam	0.531			√
Transparansi			0.135			
53.	IT1	Tingkat keterbukaan anggaran Satintelkam	0.470		√	
54.	IT2	Tingkat keterbukaan prosedur dan Biaya pelayanan publik (SKCK)	0.530		√	
Keadilan (Fairness)			0.136			
55.	IF1	Keadilan dalam pelaksanaan fungsi Satintelkam	0.510			√
56.	IF3	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Satintelkam	0.490	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Efektivitas			0.140			
57.	IE1	Tingkat realisasi terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 dan 2015 (SKCK)	0.154	√		
58.	IE2	Efektivitas sarana pengaduan layanan SKCK	0.174			√
59.	IE3	Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK	0.170	√		
60.	IE4	Persentase serapan anggaran Satintelkam	0.161	√		
61.	IE5	Koordinasi data sidik jari antara Intelkam dan reskrim dalam hal pelayanan SKCK	0.168			√
62.	IE6	Efektivitas tingkat koordinasi antara anggota Intelkam dengan Satfung Reserse, Binmas, Sabhara, Lantas, Humas	0.173			√
Akuntabilitas			0.141			
63.	IA1	Laporan terhadap penerimaan dan penggunaan dana PNBP (SKCK)	1.000	√		

4) Daftar Indikator Satreskrim

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.147			
64.	RK1	Persentase jumlah personel Sat Reskrim terhadap DSPP personel Satreskrim	0.324	√		
65.	RK2	Persentase jumlah personel Sat Reskrim yang memiliki kompetensi Satreskrim berbanding personel riil Reskrim	0.353	√		
66.	RK3	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Satreskrim yang dimiliki dari Mabes Polri dan Polda	0.324	√		
Responsif			0.144			
67.	RR1	Kecepatan penanganan perkara terhadap jangka waktu yang ditentukan	0.393			√
68.	RR2	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	0.336	√		
69.	RR3	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar	0.271	√		
Perilaku			0.156			
70.	RP1	Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.483	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
71.	RP2	Integritas sebagai anggota Satreskrim	0.517			√
Transparansi			0.142			
72.	RT1	Tingkat Keterbukaan anggaran Satreskrim	0.474		√	
73.	RT2	Tingkat keterbukaan status penanganan perkara Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	0.526		√	
Keadilan (Fairness)			0.138			
74.	RF1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi	0.559			√
75.	RF2	Persentase penyidik Polwan di fungsi Satreskrim	0.441	√		
Efektivitas			0.134			
76.	RE1	Jumlah Kasus Terselesaikan (P-21, SP3 dan ADR) Terhadap total jumlah kasus yang ada	0.214	√		
77.	RE2	Persentase serapan anggaran Satreskrim	0.187	√		
78.	RE3	Koordinasi data sidik jari antara Intelkam dan Reskrim dalam hal pelayanan SKCK	0.188			√
79.	RE4	Prosentase kasus penyidikan yang dianggarkan terhadap jumlah kasus yang ditangani	0.202	√		
80.	RE5	Efektivitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)	0.210			√
Akuntabilitas			0.139			
81.	RA1	Prosedur penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)	0.528		√	
82.	RA2	Laporan analisa Kategorisasi kasus yang ditangani sesuai kategori anggaran dan kejahatan	0.472		√	

5) Daftar Indikator Satresnarkoba

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.146			
83.	NK1	Prosentase jumlah personel Satres Narkoba terhadap DSPP personel Satresnarkoba	0.335	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
84.	NK2	Prosentase jumlah personel Satres Narkoba yang memiliki kompetensi Satresnarkoba berbanding jumlah personil riil	0.348	√		
85.	NK3	Prosentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) Satresnarkoba yang dimiliki dari Mabes Polri dan Polda.	0.316	√		
Responsif			0.143			
86.	NR1	Kecepatan penanganan perkara terhadap jangka waktu yang ditentukan	0.376			√
87.	NR2	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	0.328	√		
88.	NR3	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)	0.296	√		
Perilaku			0.153			
89.	NP1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.469	√		
90.	NP2	Integritas sebagai anggota Satresnarkoba	0.531			√
Transparansi			0.144			
91.	NT1	Tingkat Keterbukaan anggaran Satresnarkoba	0.478		√	
92.	NT2	Tingkat keterbukaan status penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)	0.522		√	
Keadilan (Fairness)			0.138			
93.	NF1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi	0.554			√
94.	NF2	Prosentase penyidik perempuan di fungsi Satresnarkoba	0.446	√		
Efektivitas			0.136			
95.	NE1	Jumlah Kasus P21 (P21 dan SP3) Terhadap total jumlah kasus yang ada	0.260	√		
96.	NE2	Prosentase serapan anggaran Reskrim	0.236	√		
97.	NE3	Prosentase kasus penyidikan yang dianggarkan terhadap jumlah kasus yang ditangani	0.256	√		
98.	NE4	Koordinasi dan pertukaran informasi antara Intelkam dan Reskrim	0.251			√

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Akuntabilitas			0.141			
99.	NA1	Prosedur penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) selama 3 bulan terakhir	0.535		√	
100.	NA2	Laporan analisa Kategorisasi kasus yang ditangani sesuai kategori anggaran dan kejahatan	0.465		√	

6) Daftar indikator Satsabhara

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.138			
111.	SK1	Persentase jumlah personel Sat Sabhara terhadap DSPP personel Satsabhara	0.259	√		
121.	SK2	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Sat Sabhara terhadap jumlah personil riil Satsabhara	0.257	√		
122.	SK3	Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Satsabhara	0.241	√		
123.	SK4	Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) Satsabhara yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda	0.244	√		
Responsif			0.154			
124.	SR1	Tingkat inisiatif Satsabhara untuk melaksanakan Turjawali	0.172			√
125.	SR2	Kecepatan mendatangi TKP	0.183			√
126.	SR3	Kecepatan pasukan Dalmas dalam mendatangi TKP Unras (unjuk rasa)	0.185			√
127.	SR4	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki	0.156	√		
128.	SR5	Kecepatan personel Tipiring dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah)	0.163			√
129.	SR6	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)	0.140	√		
Perilaku			0.161			
130.	SP1	Jumlah personel Satsabhara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.469	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
131.	SP2	Integritas sebagai anggota Satsabhara	0.531			√
Transparansi			0.132			
132.	ST1	Tingkat keterbukaan anggaran Satsabhara	1.000		√	
Keadilan (Fairness)			0.140			
133.	SF1	Keadilan dalam pelaksanaan turjawali	0.565			√
134.	SF2	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Satsabhara	0.435	√		
Efektivitas			0.140			
135.	SE1	Persentase serapan anggaran Satsabhara	0.231	√		
136.	SE2	Rasio Volume Patroli terhadap Tingkat Kejahatan Terjadi (<i>Crime Total</i>)	0.254	√		
137.	SE3	Koordinasi antara Sabhara dengan Reskrim, soal peta kerawanan	0.248			√
138.	SE4	Kualitas patroli dialogis	0.266			√
Akuntabilitas			0.135			
139.	SA1	Kualitas laporan pelaksanaan kegiatan Sabhara (Turjawali, Dalmas, SAR, TPTKP, Tipiring dll)	1.000		√	

7) Daftar Indikator Sipropam

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.141			
140.	PK1	Persentase jumlah personel riil Sipropam terhadap DSPP personel Sipropam	0.326	√		
141.	PK2	Persentase jumlah personel Sipropam yang memiliki kompetensi Sipropam (dikbangspes provos, paminal/ peraturan internal Polri) terhadap jumlah personel riil Sipropam	0.353	√		
142.	PK3	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) Sipropam yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda	0.321	√		
Responsif			0.144			
143.	PR1	Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Sipropam untuk melakukan penegakkan disiplin	0.528			√
144.	PR2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki (yang ditandatangani oleh Kapolres/Kasipropam)	0.472	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Perilaku			0.155			
145.	PP1	Jumlah personel Sipropam yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.328	√		
146.	PP2	Keadilan dalam pelayanan pengaduan masyarakat	0.324			√
147.	PP3	Integritas sebagai anggota Sipropam	0.349			√
Transparansi			0.138			
148.	PT1	Tingkat Keterbukaan anggaran Sipropam	0.474		√	
149.	PT2	Tersedianya informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan masyarakat Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Pengawasan (SPHP2)	0.526		√	
Keadilan (Fairness)			0.141			
150.	PF1	Persentase penerbitan surat keterangan rehabilitasi dibandingkan jumlah orang yang sudah selesai masa pengawasan	0.548	√		
151.	PF2	Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Sipropam	0.452	√		
Efektivitas			0.135			
152.	PE1	Persentase kasus selesai dengan jumlah kasus pelanggaran personel selama 3 tahun terakhir	0.247	√		
153.	PE2	Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan	0.255	√		
154.	PE3	Kecepatan waktu dalam menangani pengaduan masyarakat	0.262			√
155.	PE4	Persentase serapan anggaran Sipropam per tahun	0.236	√		
Akuntabilitas			0.145			
156.	PA2	Praktik menyimpang dari Sipropam secara internal dan eksternal	1.000			√

8) Daftar indikator SPKT

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.138			
157.	KK1	Persentase jumlah personel riil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terhadap DSP	0.500	√		
158.	KK2	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) SPKT yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda	0.500	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Responsif			0.156			
159.	KR1	Kecepatan personel SPKT dalam melayani aduan dari internal maupun eksternal Polres	1.000			√
Perilaku			0.153			
160.	KP1	Jumlah personel SPKT yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.476	√		
161.	KP2	Integritas sebagai anggota SPKT	0.524			√
Transparansi			0.135			
162.	KT1	Praktik penyimpangan layanan publik	0.319			√
163.	KT2	Kemudahan akses pelaporan saran, kritik dan pengaduan melalui media Polres	0.342		√	
164.	KT3	Tingkat keterbukaan prosedur layanan SPKT Perkap Nomor 23 Tahun 2010	0.339		√	
Keadilan (Fairness)			0.143			
165.	KF1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi	0.563			√
166.	KF2	Persentase personel Polwan di SPKT terhadap total personel struktural SPKT	0.437	√		
Efektivitas			0.132			
167.	KE1	Keaktifan personel SPKT dalam menindaklanjuti laporan ke satfung lain	0.507			√
168.	KE2	Persentase jumlah tanda terima yang diberikan ke pelapor atau pemohon	0.493	√		
Akuntabilitas			0.142			
169.	KA1	Tersedianya dokumentasi rekapitulasi aduan masyarakat yang disalurkan ke masing-masing fungsi	1.000		√	

9) Daftar indikator Satlantas

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
Kompetensi			0.106			
170.	LK1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Satlantas berbanding jumlah personel riil	0.400	√		
171.	LK2	Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Satlantas	0.400	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
172.	LK3	Dokumentasi Regulasi atau Piranti Lunak (Pilun) Satlantas yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki (Mabes dan Polda)	0.200	√		
Responsif			0.233			
173.	LR1	Tingkat inisiatif Satlantas untuk melaksanakan Turjawali Satlantas	0.225			√
174.	LR2	Kecepatan mendatangi TKP Kecelakaan	0.359			√
175.	LR3	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	0.072	√		
176.	LR4	SIM Keliling, Pelayanan di sentra-sentra Publik	0.139		√	
177.	LR5	Kecepatan personel Lantas dalam menangani pelayanan SIM	0.139			√
178.	LR6	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)	0.065	√		
Perilaku			0.205			
179.	LP1	Jumlah personel Satlantas yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	0.194	√		
180.	LP2	Kerawanan Permintaan Uang Pelicin ketika mengurus SIM	0.356			√
181.	LP3	Kerawanan Permintaan Uang Pelicin ketika mengurus Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)	0.326			√
182.	LP4	Kerawanan kekerasan fisik dan verbal terhadap tersangka/terdakwa kecelakaan Lalu Lintas	0.124			√
Transparansi			0.135			
183.	LT1	Tingkat keterbukaan anggaran Satlantas	0.200		√	
184.	LT2	Tingkat keterbukaan laporan pelaksanaan tugas Satlantas	0.200		√	
185.	LT3	Tingkat keterbukaan prosedur, biaya dan waktu pembuatan SIM di Polres	0.600		√	
Keadilan (Fairness)			0.114			
186.	LF1	Perlakuan yang sama dalam pelaksanaan turjawali	0.500			√
187.	LF2	Perlakuan yang sama terhadap pemohon SIM	0.500			√
Efektivitas			0.079			
188.	LE1	Persentase serapan anggaran Satlantas	0.088	√		

No	Kode	Indikator	Bobot	Jenis Data		
				Objektif	Uji Akses/ Observasi	Persepsi
189.	LE2	Tingkat resiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres tahun 2014 - 2015	0.167	√		
190.	LE3	Standar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan layanan SIM	0.167		√	
191.	LE4	Efektivitas sarana pengaduan layanan SIM	0.158			√
192.	LE5	Tingkat realisasi terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 dan 2015 (SIM)	0.088	√		
193.	LE6	Tingkat Pelayanan Bersih dari Percaloan layanan SIM di Polres	0.331			√
Akuntabilitas			0.129			
194.	LA1	Laporan terhadap penerimaan dan penggunaan dana PNBP SIM	0.260		√	
195.	LA2	Kualitas laporan pelaksanaan tugas Satlantas	0.327		√	
196.	LA3	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	0.413		√	

Kriteria standar ITK spesifik disusun berdasarkan kebutuhan dengan mempedomani karakteristik wilayah dan kriteria yang diinginkan, misalnya pada Tahun 2017 dilaksanakan pengukuran ITK tingkat Polres dengan kriteria perbatasan, perairan dan rawan konflik. Penetapan standar ITK spesifik yang telah disepakati tim Kemitraan dan Polri sebagai berikut:

REKAPITULASI INDIKATOR GENERIK DAN SPESIFIK

KRITERIA POLRES	GENERIK	SPESIFIK	TOTAL
Perairan	184	31	215
Perbatasan	185	11	196
Rawan Konflik	179	13	192

**Indikator Tatakelola Polres kriteria
Perbatasan, Perairan dan Rawan Konflik**

Keterangan:

G= Generik, S=Spesifik, P= Persepsi, OB= Observasi/Uji Akses, O= Objektif

SATUAN BINMAS								
INDIKATOR			Generik/Spesifik					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
1.	BK1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SAT BINMAS (Dikbangspes, Prolat, Ijazah S1, S2 dan S3) berbanding personil riil Satbinmas	G	O	G	O	G	O
2.	BK2	Rasio jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Satbinmas	G	O	G	O	G	O
3.	BK3	Rasio jumlah kendaraan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Bhabinkamtibmas	G	O	G	O	G	O
4.	BK4	Kepatuhan pengarsipan Regulasi atau Piranti Lunak (Pilun) Satbinmas yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda	G	O	G	O	G	O
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
5.	BR1	Tingkat inisiatif Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan Satbinmas	G	P	-	-	-	-
		Tingkat inisiatif anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penyuluhan terhadap wilayah perbatasan (<i>anti trafficking</i> , Narkoba, Senjata Api, Teroris, Komoditas barang ilegal, <i>illegal logging</i>)	-	-	G	P	-	-
		Tingkat inisiatif Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan Satbinmas	-	-	-	-	G	P
6.	BR2	Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa (<i>Problem Solving</i>)	G	P	G	P	G	P
7.	BR3	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki BINMAS	G	O	G	O	-	O
		SOP penanganan konflik pada fungsi BINMAS	-	-	-	-	S	OB
8.	BR4	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/Pemda dan sejenisnya)	G	O	G	O	-	O
		Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/ pemda dan sejenisnya) termasuk organisasi keagamaan dan dinas terkait sebagai upaya pencegahan dan menangkal sebaran paham radikal, pro kekerasan dan intoleransi	-	-	-	-	S	O

SATUAN BINMAS								
INDIKATOR			Generik/Spesifik					
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
9.	BP1	Jumlah personel Satbinmas yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O
10.	BP2	Intensitas pemberian uang terima kasih ketika personel Bhabinkamtibmas berhasil menyelesaikan masalah masyarakat	G	P	G	P	G	P
11.	BP3	Tingkat kerawanan pemberian uang pelicin kepada personel Bhabinkamtibmas dalam rangka menyelesaikan masalah masyarakat	G	P	G	P	G	P
12.	BP4	Tingkat komitmen Bhabinkamtibmas dalam menegakkan hukum dan konstitusi meski bertentangan dengan masyarakat di perbatasan	G	P	-	-	-	-
13.	BP5	Tingkat kerawanan kekerasan fisik atau seksual terhadap masyarakat dalam penyelesaian sengketa antarmasyarakat	G	P	-	-	G	P
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
14.	BT1	Tingkat keterbukaan anggaran Satbinmas	G	OB	G	OB	G	OB
15.	BT2	Tingkat keterbukaan informasi jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polres (Polsek, Subsektor)	G	OB	G	OB	G	OB
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
16.	BF1	Keadilan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas	G	P	G	P	G	P
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
17.	BE1	Rasio Bhabinkamtibmas definitif di wilayah Polres (Polsek, Subsektor) terhadap jumlah desa	G	O	G	O	G	O
18.	BE2	Efektivitas keberadaan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM)	G	P	G	P	G	P
19.	BE3	Persentase serapan anggaran Satbinmas	G	O	G	O	G	O
20.	BE4	Efektivitas bantuan personel Bhabinkamtibmas dalam memediasi penyelesaian masalah di tengah masyarakat – (Perkap 37 Tahun 2008)	G	P	-	-	-	-
		Bantuan personel Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat - (Perkap 37 Tahun 2008)	-	-	G	P	-	-
21.	BE5	Daftar sebaran organisasi, tokoh yang diduga menyulut konflik, paham radikal, intoleran dan pro kekerasan	-	-	-	-	S	OB

SATUAN BINMAS								
INDIKATOR			Generik/Spesifik					
22.	BE6	Jumlah problem solving yang dilakukan Bhabinkamtibmas	-	-	-	-	S	O
23.	BE7	Jumlah kegiatan Pembinaan terhadap tokoh-tokoh intoleran, radikal dan eks pelaku konflik	-	-	-	-	S	O
24.	BE8	Koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinsos, Pemda, UMKM dalam pembinaan tokoh-tokoh radikal, intoleran atau eks pelaku konflik SARA termasuk eks teror.	-	-	-	-	S	P
25.	BE9	Frekuensi pertemuan Kapolres dalam rangka meredam potensi konflik dalam setahun terakhir	-	-	-	-	S	O
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
26.	BA1	Kualitas laporan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas Perbatasan	G	OB	-	-	G	-
		Kualitas laporan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas perairan	-	-	G	OB	-	-
		Kualitas laporan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas	-	-	-	-	G	OB
27.	BA2	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB

SATUAN LALU LINTAS								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
1.	LK1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Satlantas berbanding jumlah personel riil	G	O	G	O	G	O
2.	LK2	Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Satlantas	G	O	G	O	G	O
3.	LK3	Dokumentasi Regulasi atau Piranti Lunak (Pilun) Satlantas yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki (Mabes dan Polda)	G	O	G	O	G	O
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
4.	LR1	Tingkat inisiatif Satlantas untuk melaksanakan Turjawali Satlantas	G	P	G	P	G	P
5.	LR2	Kecepatan mendatangi TKP Kecelakaan	G	P	G	P	G	P
6.	LR3	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	G	O	G	O	G	O
7.	LR4	SIM Keliling, Pelayanan di sentra Publik	G	OB	G	OB	G	OB
8.	LR5	Kecepatan personel Lantas dalam menangani pelayanan SIM	G	P	G	P	G	P
9.	LR6	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/Pemda dan lembaga terkait)	G	O	G	O	G	O

SATUAN LALU LINTAS									
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi						
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
10.	LP1	Jumlah personel Satlantas yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O	
11.	LP2	Kerawanan Permintaan Uang Pelicin ketika mengurus SIM	G	P	G	P	G	P	
12.	LP3	Kerawanan Permintaan Uang Pelicin ketika mengurus Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)	G	P	G	P	G	P	
13.	LP4	Kerawanan kekerasan fisik dan verbal terhadap tersangka/terdakwa kecelakaan Lalu Lintas	G	P	G	P	G	P	
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
14.	LT1	Tingkat keterbukaan anggaran Satlantas	G	OB	G	OB	G	OB	
15.	LT2	Tingkat keterbukaan laporan pelaksanaan tugas Satlantas	G	OB	G	OB	G	OB	
16.	LT3	Tingkat keterbukaan prosedur, biaya dan waktu pembuatan SIM di Polres	G	OB	G	OB	G	OB	
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
17.	LF1	Perlakuan yang sama dalam pelaksanaan turjawali	G	P	G	P	G	P	
18.	LF2	Perlakuan yang sama terhadap pemohon SIM	G	P	G	P	G	P	
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
19.	LE1	Persentase serapan anggaran Satlantas	G	O	G	O	G	O	
20.	LE2	Tingkat resiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres tahun 2014 – 2015	G	O	G	O	G	O	
21.	LE3	Standar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan layanan SIM	G	OB	G	OB	G	OB	
22.	LE4	Efektivitas sarana pengaduan layanan SIM	G	P	G	P	G	P	
23.	LE5	Tingkat realisasi terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 dan 2015 (SIM)	G	O	G	O	G	O	
24.	LE6	Tingkat Pelayanan Bersih dari Percaloan layanan SIM di Polres	G	P	G	P	G	P	
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
25.	LA1	Laporan terhadap penerimaan dan penggunaan dana PNBP SIM	G	OB	G	OB	G	OB	
26.	LA2	Kualitas laporan pelaksanaan tugas Satlantas	G	OB	G	-	G	OB	
27.	LA3	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB	

SATUAN INTELKAM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
1.	IK1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Satintelkam berbanding personel riil Intelkam	G	O	G	O	G	O
2.	IK2	Rasio jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Satintelkam	G	O	G	O	G	O
3.	IK3	Kepatuhan pengarsipan Regulasi atau Piranti Lunak (Pilun) Satintelkam yang dimiliki dari Mabes Polri dan Polda	G	O	G	O	G	O
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
4.	IR1	Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan deteksi Intelijen	S	P	-	-	-	-
		Jumlah penggalangan anggota Intelijen dalam rangka pencegahan konflik dibanding dengan total potensi konflik	-	-	G	P	G	P
5.	IR2	Kecepatan personel Intelkam dalam melayani pembuatan SKCK	G	P	G	P	G	P
6.	IR3	Pemuktahiran Peta Kerawanan Peta kerawanan jalan ilegal yang tidak dijaga oleh imigrasi dan bea cukai	G	P	-	-	-	-
		Pemuktahiran Peta Kerawanan termasuk jalur ilegal perairan	-	-	G	P	-	-
		Pemuktahiran Peta Kerawanan termasuk jalur ilegal konflik	-	-	-	-	G	OB
7.	IR4	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	G	O	-	O	G	-
		Kecepatan tindak lanjut laporan informasi (LI)	-	-	G	-	G	P
8.	IR5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)	G	O	G	O	G	O
9.	IR6	Frekuensi pertemuan Kapolres dengan lembaga terkait (Pemda, Bea cukai, imigrasi dan TNI) dalam rangka pencegahan terjadinya kasus masuknya kegiatan ilegal di perbatasan	S	O	-	-	-	-
10.	IR7	Dalam tiga bulan terakhir, berapa kali Kapolres bertemu dengan lembaga terkait (Pemda, Bea Cukai, imigrasi dan TNI) dalam rangka pencegahan terjadinya kasus masuknya kegiatan ilegal di perbatasan	S	O	-	-	-	-
11.	IR8	Monitoring media center (media sosial, Koran lokal, selebaran) yang berpotensi memprovokasi massa atau menyebarkan paham radikal, intoleran, dan pro kekerasan	S	OB	-	-	-	-
12.	IR9	Koordinasi data sidik jari antara Intelkam dan reskrim dalam hal pelayanan SKCK	G	P	G	P	-	-

SATUAN INTELKAM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
13.	IP1	Jumlah personel Sat Intelkam yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O
14.	IP2	Tingkat kerawanan permintaan uang pelicin untuk mempercepat proses pengurusan SKCK	G	P	G	P	G	P
15.	IP3	Tingkat kerawanan pungutan liar (biaya yang tidak sesuai ketentuan) dalam pengurusan SKCK	G	P	G	P	G	P
16.	IP4	Tingkat kerawanan kekerasan fisik atau verbal dalam pelaksanaan tugas mencari informasi	G	P	-	P	G	P
		Antisipasi ancaman penangkapan ikan ilegal (IUU <i>fishing</i>) meski bertentangan dengan kelompok kuat (pengusaha atau pejabat berpengaruh)	-	-	G	P	-	-
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
17.	IT1	Tingkat keterbukaan anggaran Intelkam	G	OB	G	OB	G	OB
18.	IT2	Tingkat keterbukaan prosedur dan Biaya pelayanan publik (SKCK)	G	OB	G	OB	G	OB
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
19.	IF1	Keadilan dalam pelaksanaan fungsi Satintelkam	G	P	G	P	G	P
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
20.	IE1	Tingkat penerimaan PNPB SKCK 2015 dan 2016	G	O	-	-	G	O
		Tingkat realisasi terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 dan 2015 (SKCK)	-	-	G	O	-	-
21.	IE2	Efektivitas sarana pengaduan layanan SKCK	G	P	G	P	G	P
22.	IE3	Standar pengukuran SKM layanan SKCK (Format sesuai Permenpan, Frekuensi, Tindak Lanjut)	G	OB	-	-	-	-
		Standar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK	-	-	G	OB	G	OB
23.	IE4	Persentase serapan anggaran Satintelkam	G	O	G	O	G	O
24.	IE5	Koordinasi data sidik jari antara Intelkam dan Reskrim dalam hal pelayanan SKCK	G	P	G	P	-	P

SATUAN INTELKAM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
25.	IE6	Efektivitas tingkat koordinasi antara anggota Intelkam dengan Satfung Reserse, Binmas, Sabhara, Lantas, Humas	G	P	G	P	G	P
		Jumlah laporan Informasi khusus (infosus) dan laporan penugasan (Lapgas) Intelijen yang diproduksi 1 polres dalam waktu 1 tahun terakhir	-	-	S	O	-	-
26.	IE7	Frekuensi jumlah penggalangan yang berhasil menurunkan potensi konflik (Kompilasi Infosus dan Lapgas 3 bulan terakhir)	S	O	-	-	-	-
27.	IE5	Persentase konflik SARA/SDA/Politik/ yang berhasil diredam	-	-	-	-	S	O
28.	IE6	Jumlah produk Infosus dan Lapgas yang berkaitan dengan isu konflik, radikal dan intoleransi	-	-	-	-	S	O
29.	IE7	Update laporan potensi konflik yang dikirimkan ke Polda	-	-	-	-	S	OB
30.	IE8	Frekuensi kehadiran Pimpinan (Kapolres/Kasat) dalam forum komunikasi intelijen daerah setahun terakhir	-	O	-	-	S	-
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O	Perairan P/OB/O	R. Konflik P/OB/O			
31.	IA1	Laporan terhadap penerimaan dan penggunaan dana PNBP (SKCK)	G	OB	-	OB	-	-
32.	IA2	Kinerja anggota intelkam di dalam membentuk jejaring, pembinaan dan penggalangan	-		G	P	S	P
33.	IA2	Akuntabilitas laporan penerimaan dana PNBP (SKCK)	-	OB	G	OB	-	OB
34.	IA2	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB

SATUAN RESKRIM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O	Perairan P/OB/O	R. Konflik P/OB/O			
1.	RK1	Persentase jumlah personel Satreskrim yang memiliki kompetensi Satreskrim berbanding personel riil Reskrim	G	O	G	O	G	O
2.	RK2	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Satreskrim yang dimiliki dari Mabes Polri dan Polda	G	O	-	-	-	-
		Kepatuhan pengarsipan Regulasi atau Piranti Lunak (Pilun) Satreskrim yang dimiliki dari Mabes Polri dan Polda	-	-	G	O	G	O

SATUAN RESKRIM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
3.	RK3	Jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 (dalam kondisi baik) dibandingkan dengan Personel Satreskrim	G	O	-	-	-	-
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
4.	RR1	Kecepatan penanganan perkara terhadap jangka waktu yang ditentukan	G	P	G	P	G	P
5.	RR2	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	G	O	G	O	G	O
6.	RR3	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/Pemda dan sejenisnya)	G	O	G	O	G	O
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
7.	RP1	Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O
8.	RP2	Tingkat kerawanan kekerasan fisik atau seksual terhadap tersangka ketika proses penyelidikan dan penyidikan	G	P	G	P	G	P
9.	RP3	Tingkat kerawanan kekerasan verbal terhadap tersangka ketika proses penyelidikan dan penyidikan	G	P	G	P	G	P
10.	RP4	Tingkat kerawanan pemerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan	G	P	G	P	G	P
11.	RP5	Tingkat kerawanan pemberian uang pelicin kepada penyidik dalam penanganan kasus pidana umum	G	P	G	P	G	P
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
12.	RT1	Tingkat Keterbukaan anggaran Reskrim	G	OB	G	OB	G	OB
13.	RT2	Tingkat keterbukaan status penanganan perkara Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) <i>Perkaba No 3 tahun 2014</i>	G	OB	G	OB	G	OB
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
14.	RF1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi	G	P	G	P	G	P
15.	RF2	Persentase penyidik Polwan di fungsi Satreskrim	G	O	G	O	G	O
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
16.	RE1	Jumlah Kasus Terselesaikan (P-21, SP3 dan ADR) Terhadap total jumlah kasus yang ada. Jumlah kasus yang ditangani terkait pelanggaran perbatasan dibanding jumlah kasus yang dilaporkan	G	O	-	-	-	-
		Jumlah Kasus Terselesaikan (P-21, SP3 dan ADR) Terhadap total jumlah kasus yang ada	-	-	G	O	G	O

SATUAN RESKRIM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
17.	RE2	Persentase serapan anggaran Reskrim	G	O	G	O	G	O
18.	RE3	Koordinasi data sidik jari antara Intelkam dan Reskrim dalam hal pelayanan SKCK	G	P	G	P	G	P
19.	RE4	Persentase kasus penyidikan yang dianggarkan terhadap jumlah kasus yang ditangani (kasus sangat sulit, sulit, sedang, ringan) <i>(Perkap 14 2012, Perkaba Nomor 3 Tahun 2014, Surat Keputusan Kaba SATRESKRIM Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskrim)</i>	G	O	G	O	G	O
20.	RE5	Efektivitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)	G	O	G	O	G	O
21.	RE6	Jumlah kasus yang dilimpahkan ke imigrasi dibanding total kasus pelanggaran UU Keimigrasian	S	O	-	-	-	-
22.	RE7	Jumlah kasus yang dilimpahkan ke bea cukai dibanding total kasus pelanggaran UU Bea Cukai	S	O	-	-	-	-
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
23.	RA1	Prosedur penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) - <i>Perkaba Nomor 3 Tahun 2014</i>	G	OB	G	OB	G	OB
24.	RA2	Laporan analisa Kategorisasi kasus yang ditangani sesuai kategori anggaran dan kejahatan	G	OB	G	OB	G	OB
25.	RA3	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	-	G	O	G	-

SATUAN RESKRIM NARKOBA								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
1.	NK1	Persentase jumlah personel Satres Narkoba yang memiliki kompetensi Satres Narkoba berbanding personel riil	G	O	G	O	G	O
2.	NK2	Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) Satres Narkoba yang dimiliki	G	O	G	O	G	O

SATUAN RESKRIM NARKOBA									
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi						
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
3.	NR1	Kecepatan penanganan perkara terhadap jangka waktu yang ditentukan	G	P	G	P	G	P	
4.	NR2	Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki	G	O	G	O	G	O	
5.	NR3	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihakswasta/Pemda dan sejenisnya)	G	O	G	O	G	O	
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
6.	NP1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O	
7.	NP2	Tingkat kerawanan kekerasan fisik atau seksual terhadap tersangka ketika proses Lidik-Sidik	G	P	G	P	G	P	
8.	NP3	Tingkat kerawanan kekerasan verbal terhadap tersangka ketika proses Lidik-Sidik	G	P	G	P	G	P	
9.	NP4	Tingkat kerawanan pemerasan terhadap tersangka dalam proses Lidik-Sidik	G	P	G	P	G	P	
10.	NP5	Tingkat kerawanan pemberian uang pelicin kepada penyidik dalam penanganan kasus pidana Narkoba	G	P	G	P	G	P	
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
11.	NT1	Tingkat Keterbukaan anggaran Satnarkoba	G	OB	G	OB	G	OB	
12.	NT2	Tingkat keterbukaan status penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) – <i>Perkaba Nomor 3 Tahun 2014</i>	G	OB	G	OB	G	OB	
Keadilan			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
13.	NF1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi	G	P	G	P	G	P	
14.	NF2	Persentase penyidik perempuan di fungsi Satres Narkoba	G	O	G	O	G	O	
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
15.	NE1	Jumlah Kasus P21 (P21 dan SP3) terhadap total jumlah kasus yang ada	G	O	G	O	G	O	
16.	NE2	Prosentase serapan anggaran Resnarkoba	G	O	G	O	G	O	
17.	NE3	Persentase kasus penyidikan yang dianggarkan terhadap jumlah kasus yang ditangani (kasus sangat sulit, sulit, sedang, ringan) <i>(Perkap 14 2012, Perkaba Nomor 3 Tahun 2014, Surat Keputusan Kaba SATRESKRIM Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskrim)</i>	G	O	G	O	G	O	

SATUAN RESKRIM NARKOBA									
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi						
18.	NE4	Koordinasi dan pertukaran informasi antara Intelkam dan Resnarkoba	G	P	G	P	G	P	
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
19.	NA1	Prosedur penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) - Perkaba Nomor 3 Tahun 2014	G	OB	G	OB	G	OB	
20.	NA2	Laporan analisa kategorisasi kasus yang ditangani sesuai kategori anggaran dan kejahatan	G	OB	G	OB	G	OB	
21.	NA3	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB	

SATUAN SABHARA									
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi						
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
1.	SK1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Satsabhara terhadap jumlah personel riil Satsabhara Pelatihan anggota terhadap keahlian tertentu (bahasa asing, menguasai peraturan perundang-undangan imigrasi, karantina, UU Perlindungan Konsumen)	G	O	G	O	G	O	
2.	SK2	Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Satsabhara	G	O	G	O	G	O	
3.	SK3	Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) Satsabhara yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda	G	O	G	O	G	O	
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
4.	SR1	Tingkat inisiatif Satsabhara untuk melaksanakan Turjawali	G	P	G	P	G	P	
5.	SR2	Kecepatan mendatangi TKP	G	P	G	P	G	P	
6.	SR3	Kecepatan pasukan Dalmas dalam mendatangi TKP unras (unjuk rasa)	G	P	G	P	G	P	
7.	SR4	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki. SOP yang terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan SOP yang terkait dengan Tupoksi Polres perbatasan (peraturan perundangan imigrasi, karantina, perlindungan konsumen)	G	O	-	-	-	-	
		Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki. SOP yang terkait dengan pengamanan wilayah perairan SOP yang terkait dengan Tupoksi Polres perairan (peraturan perundangan imigrasi, karantina, perlindungan konsumen)	-	-	S	O	-	-	

SATUAN SABHARA								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
		Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki. <ul style="list-style-type: none"> SOP yang terkait dengan pengamanan wilayah konflik SOP yang terkait dengan Tupoksi Polres konflik 	-	-	-	-	S	O
8.	SR5	Kecepatan personel Tipiring dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah)	G	P	G	P	G	P
9.	SR6	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/Pemda dan sejenisnya)	G	O	G	O	G	O
10.	SR7	Koordinasi dan pemberian bantuan (personil, peralatan) Sabhara kepada Polsek perbatasan	S	P	-	-	-	-
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
11.	SP1	Jumlah personel Satsabhara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O
12.	SP2	Tingkat kerawanan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa atau demonstrasi	G	P	G	P	G	P
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
13.	ST1	Tingkat Keterbukaan anggaran Satsabhara	G	OB	G	OB	G	OB
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
14.	SF1	Tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan turjawali	G	P	G	P	G	P
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
15.	SE1	Persentase serapan anggaran Satsabhara	G	O	G	O	G	O
16.	SE2	Rasio Volume Patroli terhadap Tingkat Kejahatan Terjadi (Crime Total)	G	O	G	O	G	O
17.	SE3	Koordinasi antara Sabhara dengan Reskrim, soal peta kerawanan	G	P	G	P	G	P
18.	SE4	Kualitas patroli dialogis	G	P	G	P	G	P
19.	SE5	Efektivitas pengamanan wilayah perbatasan	S	P	-	-	-	-
20.	SE6	Volume bantuan Sabhara terhadap Polsek untuk patroli perbatasan	S	P	-	-	-	-
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
21.	SA1	Kualitas laporan pelaksanaan kegiatan sabhara (Turjawali, Dalmas, SAR, TPTKP, Tipiring dll)	G	OB	G	OB	G	OB
22.	SA2	Kualitas akses laporan supervisi Sabhara terhadap patrol perbatasan	S	OB	-	-	-	-
23.	SA3	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB

BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (BAGSUMDA)								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
1.	MK1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Sumda berbanding personel riil Bagsumda	G	O	G	O	G	O
2.	MK2	Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) Bagsumda yang bersumber dari Mabes Polri, Polda dan Polres	G	O	G	O	G	O
3.	MK3	Rasio personel Bagsumda yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum berbanding personel riil Polres	G	O	G	O	G	O
4.	MK4	Jumlah personel Bagsumda yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	G	O	G	O	G	O
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
5.	MR1	Tingkat inisiatif Bagsumda untuk menyelesaikan masalah/pengaduan personalia	G	P	G	P	G	P
6.	MR2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki Sumda	G	O	G	O	G	O
7.	MR3	Tersedianya daftar usulan mutasi di lingkungan Polres secara periodik 6 bulan sekali (Perkap No. 16 tahun 2012)	G	OB	G	OB	G	OB
8.	MR4	Implementasi sistem penilaian kinerja (<i>performance evaluation</i>) personel Polres per semester	G	P	G	OB	G	OB
9.	MR5	Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)	G	O	G	O	G	O
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
10.	MP1	Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana (tempat asal satfung personel melakukan pelanggaran)	G	O	G	O	G	O
11.	MP2	Kerawanan permintaan uang pelicin saat mengurus kenaikan pangkat, berkas tanda jasa dan atau pendidikan (kejuruan/pelatihan) di Bagsumda	G	P	G	P	G	P
12.	MP3	Intensitas pemberian hadiah bagi anggota Bagsumda ketika mengurus kenaikan pangkat, berkas tanda jasa dan atau pendidikan (Dikbangspes/pelatihan)	G	P	G	P	G	P
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
13.	MT1	Tingkat Keterbukaan anggaran Bagsumda (diumumkan secara terbuka)	G	OB	G	OB	G	OB
14.	MT2	Tingkat keterbukaan informasi rekrutmen jabatan di Polres	G	P	G	P	G	P

SATUAN SABHARA									
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi						
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
15.	MF1	Keadilan dalam memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan	G	P	G	P	G	P	
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
16.	ME1	Tingkat serapan anggaran Bag Sumda	G	O	G	O	G	O	
17.	ME2	Kualitas pendampingan personel yang ditangani Bag Sumda	G	P	G	P	G	P	
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
18.	MA1	Tersedianya laporan SIMAK BMN dan Penyalurannya	G	OB	G	OB	G	OB	
19.	MA2	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB	

SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)									
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi						
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
1.	TK1	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) SPKT yang bersumber dari Mabes Polri dan Polres	G	O	G	O	G	O	
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
2.	TR1	Kecepatan personel SPKT dalam melayani aduan dari internal maupun eksternal Polres	G	P	G	P	G	P	
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
3.	TP1	Jumlah personel SPKT yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O	
4.	TP2	Tingkat kerawanan pemerasan terhadap pelapor ketika menerima pengaduan dan laporan masyarakat	G	P	G	P	G	P	
5.	TP3	Tingkat kerawanan pemberian uang pelicin dalam proses pengaduan atau pembuatan Laporan Polisi di SPKT	G	P	G	P	G	P	
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
6.	TT1	Kemudahan akses pelaporan saran, kritik dan pengaduan melalui media Polres	G	OB	G	P	G	P	
7.	TT2	Tingkat keterbukaan prosedur layanan SPKT - Perkap 23 Tahun 2010	G	OB	G	OB	G	OB	
Keadilan			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O		
8.	TF1	Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi	G	P	G	P	G	P	

SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
9.	TF2	Prosentase personel Polwan di SPKT terhadap total personel SPKT	G	O	G	O	G	O
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
10.	TE1	Keaktifan personel SPKT dalam menindaklanjuti laporan ke Satfung lain	G	P	G	P	G	P
11.	TE2	Prosentase jumlah tanda terima yang diberikan ke pelapor atau pemohon	G	O	G	O	G	O
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
12.	TA1	Tersedianya dokumentasi rekapitulasi aduan masyarakat yang disalurkan ke masing-masing fungsi	G	OB	G	OB	G	OB
13.	TA2	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB

FUNGSI PROPAM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
1.	PK1	Persentase jumlah personel Sipropam yang memiliki kompetensi Sipropam (dikjur/dikbangspes provos, paminal/peraturan internal Polri) terhadap jumlah personel rill Sipropam	G	O	G	O	G	O
2.	PK2	Jumlah Piranti Lunak (Pilun) Sipropam yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda	G	O	G	O	G	O
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
3.	PR1	Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Sipropam untuk melakukan penegakan disiplin	G	P	G	P	G	P
4.	PR2	Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki	G	O	G	O	G	O
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
5.	PP1	Jumlah personel Sipropam yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	G	O	G	O	G	O
6.	PP2	Tingkat kerawanan kekerasan fisik atau seksual terhadap tersangka ketika proses Lidik-Sidik pelanggaran anggota	G	P	G	P	G	P
7.	PP3	Tingkat kerawanan pemerasan terhadap pelapor (masyarakat) selama proses Lidik-Sidik pelanggaran anggota Polri	G	P	G	P	G	P
8.	PP4	Tingkat kerawanan pemberian uang pelicin pada Sipropam dalam penanganan kasus pelanggaran anggota Polri	G	P	G	P	G	P
9.	PP5	Praktik menyimpang dari Sipropam secara internal dan eksternal	G	P	G	P	G	P

FUNGSI PROPAM								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
10.	PT1	Tingkat keterbukaan anggaran Sipropam (diumumkan secara terbuka)	G	OB	G	OB	G	OB
11.	PT2	Tersedianya informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan masyarakat Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Pengawasan (SPHP2)	G	OB	G	OB	G	OB
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
12.	PF1	Keadilan dalam pelayanan pengaduan masyarakat	G	P	G	P	G	P
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
13.	PE1	Persentase kasus selesai dengan jumlah kasus pelanggaran personil selama 3 tahun terakhir	G	O	G	O	G	O
14.	PE2	Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan	G	O	G	O	G	O
15.	PE3	Kecepatan waktu dalam menangani pengaduan masyarakat	G	P	G	P	G	P
16.	PE4	Persentase serapan anggaran Sipropam per tiga bulan	G	O	G	O	G	O
17.	PE5	Persentase penerbitan surat keterangan rehabilitasi dibandingkan jumlah orang yang sudah selesai masa pengawasan	G	O	G	O	G	O
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
18.	PA1	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	G	OB	G	OB	G	OB

SATUAN POL AIR								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Kompetensi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
1.	AK1	Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi berbanding dengan anggota Rill Polair	-	-	S	O	-	-
2.	AK2	Rasio kapal Polair dibanding luas wilayah perairan operasional yang menjadi tanggung jawab Polres	-	-	S	OB	-	-
3.	AK3	Kesesuaian tipe kapal yang dimiliki Sat Polair dengan tipe perairan Polres	-	-	S	OB	-	-
4.	AK4	Rasio jumlah Personel Polair terhadap jumlah pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Polres	-	-	S	O	-	-
5.	AK5	Kepatuhan pengarsipan regulasi atau Piranti Lunak (Pilun) berdasarkan tugas pokok fungsi Polair	-	-	S	O	-	-

SATUAN POL AIR								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
Responsif			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
6.	AR1	Tingkat inisiatif Polair untuk melaksanakan SAR perairan	-	-	S	P	-	-
7.	AR2	Persentase jumlah Penyuluhan Polmas di pulau terluar/terdepan/terpencil yang dilaksanakan terhadap Rencana Kegiatan (Rengiat) Polmas yang telah direncanakan	-	-	S	O	-	-
8.	AR3	SOP inisiatif/khusus yang dibuat oleh Satpolair	-	-	S	O	-	-
9.	AR4	Koordinasi lintas fungsi dalam waktu pengamanan	-	-	S	P	-	-
10.	AR5	Jumlah MoU/Perjanjian kerjasama dengan instansi terkait (Misalnya syahbandar, Dinas perhubungan, KKP, Basarda) dalam rangka mewujudkan Kamtibmas perairan	-	-	S	O	-	-
11.	AR6	Pemuktahiran Peta Kerawanan perairan	-	-	S	OB	-	-
Perilaku			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
12.	AP1	Jumlah personel Polair yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada	-	-	S	O	-	-
13.	AP2	Integritas sebagai anggota Polair	-	-	S	P	-	-
Transparansi			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
14.	AT1	Tingkat keterbukaan anggaran Polair	-	-	S	OB	-	-
15.	AT2	Akses terhadap laporan pelaksanaan tugas Polair (Patroli perairan/perbatasan, SAR, Sambang Nusa, Polmas perairan)	-	-	S	OB	-	-
16.	AT3	Akses terhadap nomor darurat atau <i>call center</i> Satpolair	-	-	S	OB	-	-
Keadilan (Fairness)			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
17.	AF1	Diskriminasi dalam pemilihan daerah dalam rute Patroli perairan/perbatasan dan Sambang Nusa	-	-	S	P	-	-
18.	AF2	Diskriminasi dalam proses penyidikan dan penindakan kasus pidana perairan	-	-	S	P	-	-
19.	AF3	Diskriminasi dalam sambang pos atau patroli perairan	-	-	S	P	-	-
Efektivitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
20.	AE1	Kecepatan waktu dalam menangani kejadian di wilayah perairan (SAR dan Gakkum)	-	-	S	P	-	-
21.	AE2	Persentase serapan anggaran Polair	-	-	S	O	-	-

SATUAN POL AIR								
INDIKATOR			Generik/Spesifik/Persepsi					
22.	AE3	Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perairan Skep Kapolri No. Pol: Skep/79/II/2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang penunjukan Pol Airud sebagai Penyidik di wilayah perairan dan bidang penerbangan Yurisdiksi Nasional Indonesia dan pelimpahan wewenang kepada Dit Pol Airud.	-	-	S	O	-	-
23.	AE4	Volume Patroli Perairan terhadap <i>crime</i> total	-	-	S	O	-	-
24.	AE5	Kualitas kehadiran dalam hal persiapan, pengamanan dan mengakhiri) pengamanan hari besar atau acara budaya yang rutin diadakan di daerah perairan	-	-	S	P	-	-
25.	AE6	Jumlah pos Polair atau kelompok warga yang menampung atau membantu melakukan patroli keamanan lingkungan	-	-	S	O	-	-
26.	AE7	Frekuensi sambang pulau/pos warga	-	-	S	O	-	-
Akuntabilitas			Perbatasan P/OB/O		Perairan P/OB/O		R. Konflik P/OB/O	
27.	AA1	Laporan pelaksanaan tugas Satpolair	-	-	S	OB	-	-
28.	AA2	Laporan tindak lanjut pengaduan/laporan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	S	OB	-	-
29.	AA3	Kualitas laporan Analisa dan Evaluasi (Anev)	-	-	S	OB	-	-

Paraf:

1. Pemrakarsa/

Karo RBP Srena Polri:

2. Asrena Kapolri:

3. Kadivkum Polri :

4. Kasetum Polri :

5. Wakapolri :

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN